

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk merupakan suatu faktor yang dominan dan merupakan modal dasar yang menjadi pusat dalam suatu pembangunan negara yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 menjelaskan mengenai jika memiliki penduduk dengan jumlah yang banyak, pertumbuhan penduduk yang cepat, kualitas penduduk yang rendah, hal ini nantinya dapat memperlambat kualitas dan kuantitas penduduk serta dapat perwujudan kondisi yang ideal antara daya tampung dan dukung lingkungan. Teori Malthus menjelaskan perkembangan penduduk nantinya akan mengikuti deret ukur sedangkan perkembangan ketersediaan pangan akan diikuti oleh deret hitung atau akan semakin jauh lebih lambat padahal manusia hidup memerlukan bahan makanan. Pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan pembatasan dalam berkembangbiak akan memenuhi permukaan bumi ini karena laju pertumbuhan penduduk tidak dibatasi atau diatur. Menurut Ida Bagoes Mantra (2003) menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu wilayah disebabkan oleh beberapa faktor kependudukan, antara lain adalah kematian (mortalitas), imigrasi penduduk dan kelahiran (fertilitas). Pertumbuhan penduduk akan terus menerus dipengaruhi oleh kelahiran bayi tetapi juga adanya kematian yang mana hal ini dapat mengurangi jumlah penduduk yang bisa terjadi tanpa memandang umur, sedangkan migrasi juga memiliki peran jika pendatang (imigran) akan bertambah dan dikurangi dengan adanya emigran.

Dalam artikel yang ditulis oleh Muhammad Baiquni (2009:43), menjelaskan tentang perkembangan jumlah penduduk yang bertambah banyak yang dalam hal ini disebut dengan “Model Transisi Demografi”. Terdapat empat fase yang menjelaskan tentang hal tersebut, yaitu:

1. Fase pertama menggambarkan angka kelahiran yang tinggi tetapi angka kematian yang juga tinggi pada periode pra-industri. Dalam hal ini penduduk tidak akan mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga pada era ini jumlah penduduk tidak banyak.
2. Fase kedua menjelaskan tentang masih tingginya angka kelahiran karena pada fase ini masih dalam tahap transisi tetapi, angka kematian sudah mengalami penurunan. Fase ini ditandai dengan peningkatan gizi karena ketersediaan pangan dan perbaikan kualitas yang sudah baik. Angka kelahiran yang tinggi ini kemudian mempengaruhi jumlah penduduk yang semakin tinggi, hal ini kemudian disebut juga dengan ledakan penduduk.
3. Fase ketiga menjelaskan tentang angka kelahiran yang menurun tetapi jumlah penduduk yang masih tinggi maka hal ini menimbulkan terjadinya ledakan penduduk mencapai puncaknya. Pemerintah mulai menggalakkan program untuk mengatasi ledakan penduduk dengan program Keluarga Berencana.
4. Fase yang terakhir adalah era industri, yang menjelaskan situasi penduduk yang sangat stabil. Jika tingkat kematian dan kelahiran kecil, namun karena jumlah penduduk yang besar maka mereka juga harus mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka yang tinggi. Hal yang mempunyai pengaruh di era industri adalah tingkat konsumsi dan gaya hidup yang tinggi, dikarenakan

permintaan energi terus meningkat, sumber daya alam yang dalam masa perkembangan dan sumber makanan meningkat secara eksponensial.

Menurut hasil data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) total penduduk Indonesia pada Semester II 2021 adalah 273.879.750 jiwa, dengan total penduduk perempuan sebesar 135.576.278 jiwa dan total penduduk pria sebesar 138.303.472 jiwa. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan sebanyak 2.529.861 jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bertambahnya jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia ini merupakan penyebab terjadinya ledakan penduduk. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan-kebutuhan dalam menjalani kehidupan seperti fasilitas, sarana dan prasarana maka. Ledakan penduduk ini nantinya dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terjadinya ledakan penduduk disebabkan karena adanya pertumbuhan penduduk yang bertambah dengan cepat dengan jangka waktu yang relatif cepat juga. Dilansir dari laman Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD) Kabupaten Bantul, ledakan penduduk ini nantinya dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain: (a) Pemerintah kesulitan dalam menyediakan kebutuhan masyarakat; (b) Peningkatan kebutuhan ruang dan lingkungan hidup di dalam masyarakat; (c) Ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pertumbuhan penduduk; (d) Adanya pemukiman yang kumuh; (e) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dapat menyebabkan sumber pangan yang ada menjadi tidak

seimbang karena terlalu tingginya jumlah penduduk yang ada; dan (f) Kemiskinan semakin merajalela karena disebabkan oleh pertumbuhan penduduk semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi.

Kemendagri dalam Nila Alfiyatul (2015:2) menjelaskan mengenai permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia sangatlah kompleks yang membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh lagi. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan kependudukan di Indonesia. Maka dari itu untuk mengatasi persoalan kependudukan di Indonesia ini, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu membuat program Keluarga Berencana (KB). KB merupakan program berskala nasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia guna mengatasi ledakan penduduk dengan menekan angka kelahiran di negara Indonesia. Program ini dirancang untuk menjaga kestabilan penduduk, memajukan sebuah negara, mensejahterakan ekonomi dan sosial dalam suatu negara. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan mengenai upaya yang akan dilakukan dalam program KB, antara lain yaitu mengatur kelahiran anak, mengatur kehamilan, melakukan promosi, mengatur jarak dan usia ideal melahirkan, melakukan perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Program ini memiliki tujuan yang penting, antara lain: (a) Mencanangkan keluarga dengan dua anak; (b) Agar pernikahan dini tidak terjadi; (c) Agar kematian ibu dan bayi tidak terjadi lagi; dan (d) Penyeimbangan antara makhluk hidup dan sumber daya yang ada. Program Keluarga Berencana memiliki manfaat,

antara lain: (a) Mencegah penyakit menular seksual; (b) Menurunkan angka kematian bayi dan ibu; (c) Membentuk keluarga yang berkualitas; (d) Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan; dan (e) Nantinya akan menjaga kesehatan ibu dan bayi.

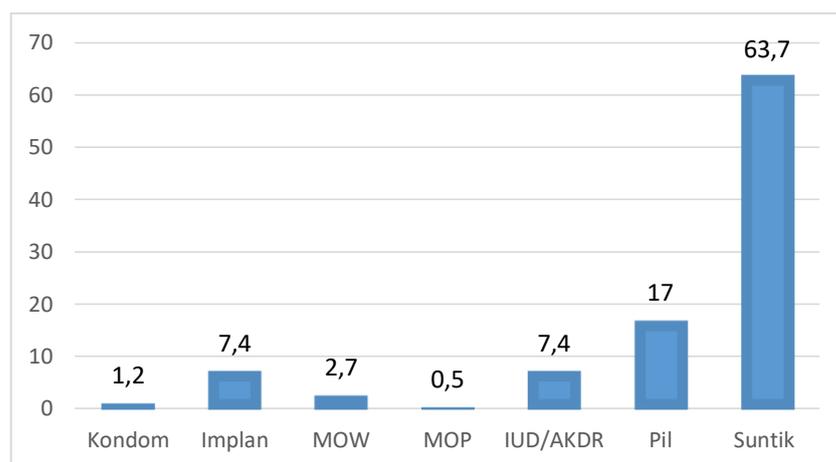
Landasan hukum program Keluarga Berencana sendiri adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009, Program KB ini nantinya dapat membuat keluarga yang sesuai dengan keadaan sosial dan kebutuhan ekonomi keluarga dengan mengatur kelahiran anak yang nantinya dapat membuat keluarga sejahtera yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Undang- Undang yang menjelaskan tentang KB yang berada pada pasal 20 hingga pasal 29. Kebijakan tentang program Keluarga Berencana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, “Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.” Program ini diawasi dan digerakkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Program Keluarga Berencana ini juga tak hanya pemerintah saja yang bergerak tetapi juga perlunya partisipasi dari masyarakat agar dapat mewujudkan program Keluarga Berencana yang berjalan dengan baik. Jika kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik maka program Keluarga

Berencana ini dapat mewujudkan program yang nantinya dapat meningkatkan kualitas dan mensejahterakan masyarakat setempat.

Alat kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam menangani permasalahan pertumbuhan penduduk. Alat kontrasepsi ini nantinya akan menghindari “4 T” yaitu terlalu banyak anak, terlalu dekat dengan jarak kelahiran, terlalu tua dan terlalu muda (Budijanto, 2013). Alat yang digunakan dalam program Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan adalah alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi tergantung jenis yang akan digunakan. Ada beberapa alat kontrasepsi, antara lain: (a) Kontrasepsi alami; (b) Pil KB; (c) Kondom pria; (d) Suntik; (e) Implan; (f) IUD (*Intrauterine Device*); (g) Kondom wanita; (h) *Vasektomi*/Metode Operasi Pria; dan (i) *Tubektomi*/Metode Operasi Wanita.

Gambar 1. 1 Partisipasi Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Modern Tahun 2019



Sumber: Laporan Profil Keluarga Indonesia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2019

Laporan Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2019 menjelaskan bahwa di Indonesia memiliki KB aktif di antara PUS sebanyak 62,5% yang mana hal ini mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 63,27%. Peserta KB Aktif paling banyak menggunakan suntikan dan pil sebagai alat kontrasepsi yang mereka gunakan. Suntikan 63,7%, pil 17%, Implan 7,4%, IUD/AKDR 7,4%, MOW 2,7%, Kondom 1,2% dan MOP hanya sebanyak 0,5%.

Pelayanan program KB adalah pelayanan yang diberikan untuk mengatur jarak, jumlah dan waktu kehamilan, meningkatkan jumlah peserta KB, menciptakan keluarga kecil yang sejahtera, dan membina peserta KB aktif yang nantinya dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang wanita untuk hamil. Seperti yang telah disebutkan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 78 yang menjelaskan mengenai pelayanan kesehatan dalam KB yaitu untuk mengatur kehamilan bagi PUS dalam menciptakan generasi penerus yang sehat dan cerdas dengan upaya yang promotif dan preventif, pelayanan dan pemulihan yang termasuk juga untuk perlindungan efek samping, komplikasi dan kegagalan alat kontrasepsi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi serta pelayanan fertilitas. Bentuk dari pelayanan KB antara lain, suntik, pil, kondom, pemasangan maupun pencabutan implan, pemasangan maupun pencabutan alat kontrasepsi yang ada di dalam rahim, pelayanan untuk tubektomi dan vasektomi.

Tabel 1. 1 Perbandingan Hasil Pelayanan KB Bulan Februari dengan Maret Nasional Tahun 2020

Jenis Pelayanan	Februari	Maret
IUD	36.155	23.383
Implan	81.062	51.536
Suntik	524.989	341.109
Pil	251.619	146.767
MOW	13.571	8.093
MOP	2.283	1.196
Kondom	31.502	19.583

Sumber: Materi Presentasi Webinar IDM Tahun 2020

Pada Webinar *International Day of The Midwife* yang diselenggarakan tanggal 5 Mei 2020, menjelaskan mengenai perbandingan pelayanan KB di Indonesia pada bulan Februari dan bulan Maret tahun 2020. Data yang ada menjelaskan bahwa pelayanan KB mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Februari dengan bulan Maret dapat dilihat dari jumlah pelayanan masing-masing alat kontrasepsi. Pada jenis pelayanan pada bulan Maret 2020, IUD memiliki partisipasi sebanyak 3,95%, pelayanan Implan memiliki partisipasi sebanyak 8,71%, suntik memiliki partisipasi sebanyak 57,65%, pil memiliki partisipasi sebanyak 24,81%, MOW memiliki partisipasi sebanyak 1,37%, MOP memiliki partisipasi sebanyak 0,20% dan kondom memiliki partisipasi sebanyak 3,31%.

Tabel 1. 2 Partisipasi Peserta Program KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah KB Aktif	Jumlah KB Tidak Aktif	Jumlah Partisipasi Wanita	Persentase Jumlah KB Wanita	Jumlah Partisipasi Pria	Persentase Jumlah KB Pria	Metode KB Pria			
									MOP	Persentase Jumlah Metode MOP	Kondom	Persentase Jumlah Metode Kondom
1.	2021	6.408.024	4.508.188	1.899.836	4.340.153	96.3%	168.035	3.7%	22.017	0.49%	146.018	3.2%
2.	2020	6.525.048	4.757.722	1.767.326	4.598.144	96%	159.578	3.4%	25.658	0.53%	133.920	2.8%
3.	2019	6.652.248	4.884.608	1.767.640	4.730.636	96.8%	153.972	3.2%	30.165	0.61%	123.807	2.5%
4.	2018	6.527.869	4.810.077	1.717.792	4.627.275	96.2%	148.035	3.1%	32.886	0.68%	115.149	2.4%
5.	2017	6.727.894	5.679.960	1.047.934	5.497.158	96.8%	182.802	3.2%	47.399	0.83%	135.403	2.4%

Sumber: Data dari BPS Provinsi Jawa Tengah yang diolah peneliti

Program KB di Provinsi Jawa Tengah didominasi dengan partisipasi wanita dengan persentase antara 96% sampai dengan 96.8% dan partisipasi pria dengan persentase antara 2.9% sampai dengan 4.5%. Partisipasi pria di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh penggunaan kondom yang memiliki partisipasi antara 2.4% sampai dengan 3.2% dan MOP memiliki partisipasi kurang dari satu persen (0.49% sampai dengan 0.83%).

Kabupaten Karanganyar adalah satu dari beberapa kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Data dari Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk 2020 pada tahun 2021 menyebutkan bahwa total penduduknya sebesar 938.808 jiwa yang terdiri dari 18 kecamatan. Pada tahun 2021 Kabupaten Karanganyar memiliki jumlah penduduk perempuan sebanyak 470.701 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 468.107 jiwa.

Tabel 1. 3 Partisipasi Peserta Program KB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah KB Aktif	Jumlah KB Tidak Aktif	Jumlah KB Wanita	Persentase Jumlah KB Wanita	Jumlah KB Pria	Persentase Jumlah KB Pria	Metode KB Pria			
									MOP	Persentase Jumlah KB MOP	Persentase Jumlah KB Kondom	
1.	2021	150.731	113.275	37.456	107.222	94.7%	6.053	5.3%	987	0.9%	5.066	4.5%
2.	2020	150.606	112.857	37.749	107.652	95.4%	5.205	4.6%	1.026	1%	4.179	3.7%
3.	2019	190.879	150.362	40.517	144.860	96.3%	5.502	3.7%	1.056	0.7%	4.446	3%
4.	2018	175.736	143.570	32.166	138.238	96.3%	5.332	3.7%	1.226	0.8%	4.106	2.9%
5.	2017	170.726	140.805	29.921	135.550	96.3%	5.255	3.7%	1.139	0.8%	4.116	2.9%

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Akhir Tahun (Bulan Desember Tahun 2017-2021)

Partisipasi KB pria pada tahun 2017-2021 di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan partisipasi KB wanita, hal ini dapat dilihat partisipasi KB wanita yang memiliki partisipasi antara 94.7% sampai dengan 96.3% sedangkan partisipasi KB pria memiliki partisipasi antara 3.7% sampai dengan 5.3%. Partisipasi KB pria lebih didominasi dengan metode kondom yang memiliki partisipasi antara 2.9% sampai dengan 4.5% dan metode KB MOP dengan partisipasi 0.7% sampai dengan 1%.

Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi pria di atas partisipasi di Provinsi Jawa Tengah yakni 4.5% sedangkan Kabupaten Karanganyar 5.3% yang didominasi oleh partisipasi kondom sebanyak 4.5% dan di Jawa Tengah sebanyak 3.2%, sedangkan partisipasi KB MOP di Jawa Tengah dibawah 1% dan di Kabupaten Karanganyar berkisar 1%.

Tabel 1. 4 Partisipasi Pria di Kabupaten Karanganyar

KECAMATAN	JUMLAH PUS	METODE KONTRASEPSI MODERN	
		MOP	KONDOM
Jatipuro	5.790	5	164
Jatiyoso	6.875	12	68
Jumapolo	6.426	29	107
Jumantono	8.135	18	95
Matesih	7.176	30	137
Tawangmangu	7.493	12	164
Ngargoyoso	6.210	19	39
Karangpandan	7.049	89	167
Karanganyar	13.480	19	431

Tasikmadu	11.269	93	651
Jaten	13.326	29	676
Colomadu	11.559	28	531
Gondangrejo	14.276	32	184
Kebakkramat	10.992	9	183
Mojogedang	10.914	22	128
Kerjo	5.940	19	67
Jenawi	4.014	107	52

Sumber: Data dari DP3APPKB Kabupaten Karanganyar yang diolah oleh peneliti, 2022

Data di atas menjelaskan bahwa partisipasi di Kecamatan Jatipuro memiliki partisipasi yang rendah khususnya dalam KB MOP jika dibandingkan dengan kecamatan yang lain karena hanya memiliki 5 partisipasi dalam KB MOP, sedangkan untuk KB Kondom sendiri Kecamatan Jatipuro memiliki partisipasi yang dapat dikatakan berada di urutan tengah di Kabupaten Karanganyar. Padahal partisipasi KB pria di Kabupaten Karanganyar sudah baik akan tetapi di Kecamatan Jatipuro masih tergolong rendah.

Kecamatan Jatipuro adalah satu dari beberapa kecamatan yang berada di kawasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan data Bapermasdes, di tahun 2019 Kecamatan Jatipuro memiliki 10 desa. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020, Kecamatan Jatipuro memiliki jumlah penduduk 33.647 jiwa, dengan total penduduk laki-laki 16.885 jiwa dan total penduduk perempuan 16.762 jiwa.

Tabel 1. 5 Partisipasi Peserta Program KB di Kecamatan Jatipuro Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah KB Aktif	Jumlah KB Tidak Aktif	Jumlah KB Wanita	Persentase Jumlah KB Wanita	Jumlah KB Pria	Persentase Jumlah KB Pria	Metode KB Pria			
									MOP	Persentase Jumlah KB MOP	Kondom	Persentase Jumlah KB Kondom
1.	2021	5.790	4.377	1.413	4.208	96.1%	169	3.9%	5	0.09%	164	2.83%
2.	2020	6.146	4.950	1.402	4.744	95.8%	206	4.2%	7	0.11%	199	3.23%
3.	2019	8.066	6.518	1.548	6.377	97.8%	141	2.2%	11	0.13%	130	1.61%
4.	2018	7.198	6.302	896	6.147	97.5%	155	2.5%	6	0.08%	149	2.07%
5.	2017	7.031	6.013	1.018	5.856	97.4%	157	2.6%	6	0.10%	151	2.14%

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Akhir Tahun (Bulan Desember Tahun 2017-2021)

Rendahnya partisipasi KB pria di Kecamatan Jatipuro pada tahun 2017-2021 dilihat dari partisipasi KB wanita yang memiliki partisipasi lebih mendominasi antara 95.8% sampai dengan 97.8% sedangkan partisipasi KB pria memiliki partisipasi yang lebih rendah antara 2.2% sampai dengan 4.2% yang mana partisipasi KB pria dibagi menjadi dua metode KB yakni partisipasi kondom yang memiliki lebih banyak partisipasi antara 1.61% sampai dengan 3.23% dan MOP (vasektomi) yang memiliki partisipasi kurang dari satu persen (0.08% sampai dengan 0.13%).

Kecamatan Jatipuro memiliki partisipasi yang masih rendah yakni 4.2% sedangkan di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi 5.3% yang didominasi oleh partisipasi kondom sebanyak 4.5% dan di Kecamatan Jatipuro sebanyak 3.23%, sedangkan untuk KB MOP di Kecamatan Jatipuro masih dibawah 1% dan di Kabupaten Karanganyar memiliki partisipasi sebanyak 1%.

Alat kontrasepsi kebanyakan dibuat untuk wanita karena kehamilan memiliki resiko yang tinggi yaitu kematian. Maka dari itu perlunya mencegah kehamilan yang tidak direncanakan melalui program Keluarga Berencana. Pria tidak mengalami resiko seperti itu, maka dari itu urgensi alat kontrasepsi pada pria dan perempuan tidak bisa seimbang. Peran serta pria dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan KB. Selanjutnya dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 2 yang menjelaskan pemerintah juga harus membantu dalam menyediakan pelayanan alat kontrasepsi bagi suami dan istri. Tak hanya itu, partisipasi pria juga

diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2d) yang menjelaskan mengenai tujuan program KB yang memerlukan peningkatan partisipasi pria dalam program KB. Hal ini menjelaskan bahwa program KB tidak hanya untuk wanita saja, tetapi peran pria juga menjadi salah satu kunci keberhasilan program KB.

BKKBN menambahkan bahwasannya partisipasi pria sangat penting dikarenakan pria merupakan rekan dari wanita dalam melakukan reproduksi dan hubungan seksual yang mana hal ini nantinya menjadi tanggung jawab bersama-sama. Menurut Sukarno dalam Nindita (2019:25) menjelaskan bahwa program KB belum maksimal dikarenakan adanya pandangan masyarakat dan faktor sosial budaya.

Setelah beberapa penjelasan singkat di atas, maka peneliti melihat perlu dilakukannya evaluasi terhadap program KB ini dikarenakan untuk menilai program yang sudah berjalan sangat lama tapi sampai saat ini juga partisipasi pria masih tergolong rendah. Maka dari itu timbul pertanyaan penelitian yaitu apakah pelaksanaan program KB oleh pemerintah sudah mampu meningkatkan kesadaran pria untuk mensukseskan partisipasi metode pria? Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik mengambil sebuah penelitian dengan judul “**Evaluasi Program Keluarga Berencana Dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1. Partisipasi pria di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021 berkisar antara 2.9% sampai dengan 4.5% yang didominasi oleh partisipasi kondom antara 2.4% sampai dengan 3.2% dengan MOP yang memiliki partisipasi kurang dari satu persen.
- 1.2.2. Partisipasi pria di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017-2021 memiliki partisipasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Partisipasi pria berkisar antara 3.7% sampai dengan 5.3%. Partisipasi kondom antara 2.9% sampai dengan 4.5% dan MOP 0.7% sampai dengan 1%.
- 1.2.3. Partisipasi pria di Kecamatan Jatipuro pada tahun 2017-2021 belum memenuhi target. Partisipasi pria sebanyak 2.2% sampai dengan 4.2%. partisipasi kondom antara 1.6% sampai dengan 3.2% dan MOP kurang dari satu persen.
- 1.2.4. Terdapat pandangan negatif atau persepsi negatif mengenai program KB pria.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2018:35). Dari latar belakang masalah yang sudah

dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1.3.1. Bagaimana evaluasi program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

1.3.2. Bagaimana faktor sosial dan budaya pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang memiliki keharusan untuk dicapai untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Maka dari itu tujuan penelitian ini yang telah ditetapkan setelah mengetahui rumusan masalahnya adalah:

1.4.1. Mengetahui evaluasi program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

1.4.2. Mengetahui faktor sosial dan budaya pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

1.5. Kegunaan Penelitian

Telah ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan pula manfaat dari penelitian ini. Melalui uraian serta pembahasan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, antara lain:

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian Evaluasi Program KB Dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar ini bermanfaat untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti sendiri. Tak hanya itu, peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberikan referensi, informasi dan kontribusi bagi kalangan akademisi dan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu tentang kebijakan program Keluarga Berencana dalam partisipasi pria.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Penelitian Evaluasi Program KB Dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar bermanfaat untuk pemerintah dikarenakan dapat digunakan sebagai acuan pertimbangan untuk pemerintah atau pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan kebijakan program KB dan dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi program KB.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang penelitian tersebut kemudian menjadi referensi dalam pembuatan penelitian selanjutnya merupakan penelitian terdahulu yang memiliki tujuan untuk membandingkan antara keadaan yang berada di lapangan dan teori yang sudah ada. Penulis kemudian mengambil beberapa penelitian dengan topik yang sama untuk menambah wawasan kajian penelitian yang akan ditulis. Beberapa penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti yang memiliki topik yang sama:

Tabel 1. 6 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widya Nengsih dan Adis Fitriyana. Jurnal Human Care Vol. 5 No. 2. (2020). “Evaluasi Pencapaian Program Keluarga Berencana di Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2019”	Tujuan dari penelitian ini adalah menilai bagaimana program KB berjalan, sudah sesuai dengan tujuan atau belum.	Peneliti menggunakan metode kualitatif.	Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa dalam hal kualitas sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana dinilai sudah cukup baik dan memadai. Tetapi masih terdapat faktor penghambat yaitu masih kurangnya dukungan pria, puskesmas yang jauh dan susah dijangkau dan minimnya keterlibatan kader.
2.	Nanang Suparman, Fadjar Tri Sakti dan Engkus. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Sosial Politik Vol. 6 No. 2. (2018). “Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat”	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi program KB, sudah sesuai dengan tujuan atau belum dan ingin mengevaluasi program KB.	Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian kurang dapat mengungkapkan bagaimana kondisi program KB, dikarenakan tidak adanya indikator keberhasilan kecuali pada aspek konteks. Dapat dikatakan bahwa evaluasi program KB belum bisa disebut dengan predikat “baik”. Hal ini dikarenakan indikator keberhasilan yang tidak lengkap dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang tidak ada.
3.	Delia Annisa, Melinda Noer, dan Feri Andrianus. Jurnal Ilmu Menara Vol. XV	Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktir apa saja yang	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan	Setelah diteliti, peran pria dan perempuan belum bisa dikatakan seimbang karena peran laki-laki dalam program KB kurang

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	No. 1. (2021). “ Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kampung KB Kota Bukittinggi ”	berpengaruh terhadap pengarusutamaan gender di kampung KB Kota Bukittinggi.	deskriptif.	optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu partisipasi, manfaat, keseluruhan akses, dan kontrol.
4.	Muhammad Mustofa dan Drs.Sudarsana PGD in PD. (2018). Jurnal <i>Physics</i> . “ Partisipasi Laki-Laki Dalam Program KB (Kasus Tentang Partisipasi Suami Dalam Program KB MOP di Desa Jelok Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali ”	Penelitian ini dilakukan agar dapat memahami bagaimana partisipasi pria dan hal apa yang menyebabkan partisipasi pria dalam KB MOP masih rendah.	Peneliti menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan angka partisipasi pria masih sangat rendah, karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum ada peserta KB baru. Hal ini dikarenakan faktor kondisi ekonomi yang kurang mendukung, adanya peraturan pemerintah, jumlah anak yang sudah mencukupi, mengikuti kemauan dan adanya dukungan dari istri dan menggantikannya posisi istri. Sedangkan yang menghambat adalah rumor negatif dan kurangnya pengetahuan pria.
5.	Sutinah. Jurnal Masyarakat & Politik Vol. 30 No. 3. (2017). “ Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga	Tujuan penelitian adalah agar dapat mengetahui bagaimana partisipasi pria, faktor apa saja yang	Menggunakan tipe penelitian survey dengan studi kualitatif yang mendalam.	Partisipasi program KB laki-laki masih rendah karena banyak yang memandang bahwa penggunaan KB dikhususkan hanya untuk wanita. Faktor yang menyebabkan program KB untuk

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Berencana di Era Masyarakat Postmodern”.	mengakibatkan dan menghambat penggunaan KB khususnya dalam partisipasi pria di era masyarakat postmodern ini menjadi meningkat.		laki-laki jarang digunakan karena laki-laki merasa takut kalau KB menyebabkan kejantanan mereka berkurang, impotensi, alat kontrasepsi vasektomi yang mahal, istri takut kalau suami menggunakan vasektomi akan membuka peluang suami untuk berselingkuh dan malu akibat digunjing oleh masyarakat. Strategi yang diberikan antara lain, yaitu mengurangi kekhawatiran suami dengan cara sosialisasi berkampanye melalui media massa dengan menampilkan artis terkenal dan dikembangkan lagi pelatihan bagi tenaga medis dalam melakukan vasektomi agar tidak terjadi kegagalan yang tidak diinginkan.
6.	Kareen Hardee, Melanie Croce Galis dan Jill Gay Jurnal Reproductive Health Vol. 14 No. 14. (2017). <i>“Are Men Well Served By Family</i>	Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan bahwa laki-laki tidak terlayani dengan baik oleh program KB.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang berdasarkan dari	Penelitian ini menunjukkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi pada pria yaitu : 1) Penyediaan Klinik Informasi dan Layanan untuk Pria;

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Planning Programs?"</i>		dokumenta si literatur.	2) Penjangkauan dengan Motivator Pria dan Pendidik/Pembimbing Sebaya; 3) Pertunangan Komunitas; 4) Program Komunikasi; dan 5) Pendidikan Seksualitas Komprehensif.
7.	Ling JES dan Tong SF. Jurnal Malaysian Family Physician Vol. 12 No. 1. (2017). <i>"The Roles of Men in Family Planning – a Study of Married Men at the UKM Primary Care Clinic"</i> .	Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi bagaimana partisipasi pria dalam program KB dan juga agar dapat mengetahui karakteristik sosial ekonomi dalam penggunaan program KB.	Dalam penelitian ini, metode <i>cross-sectional</i> merupakan metode yang digunakan. Hal ini dilakukan di unit perawatan universitas yang kemudian menggunakan beberapa narasumber dan diberi kuesioner mengenai keterlibatan dalam program KB. Kuesioner tersebut kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif	Dari penelitian yang telah dilakukan, mereka menemukan hasil bahwasannya partisipasi pria dalam program KB masih minim karena kebanyakan pria berpartisipasi dalam program PP, FCP dan DFS. Dalam program KB pun hanya dilakukan diskusi sepihak daripada bersama-sama. Peran pria dalam program KB dipengaruhi oleh usia laki-laki, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan dan tahun menikah. Strategi yang dilakukan agar peran pria dalam program KB lebih aktif adalah pria perlu mendapatkan informasi yang lebih lagi mengenai program KB, mendukung istri mereka dalam penggunaan program

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			dan inferensial.	KB dan juga menggunakan sendiri program KB.
8.	Jeane Mantiri dan Abdul Rahman Dilapanga. In The Third International Conference on Social Sciences (ICSS). (2020). <i>“Evaluation of Family Planning Programs in Minahasa Regency”</i> .	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program KB yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa dengan model evaluasi (<i>Context, Input, Process, Product</i>).	Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.	Hasil penelitian sebagai berikut: a. <i>Context</i> : berbagai kebutuhan yang menunjang program, kekuatan dan kelemahan, serta partisipasi masyarakat dalam program KB; b. <i>Input</i> : sudah adanya ketersediaan sumber daya yang mendukung; c. <i>Process</i> : hal ini dilihat dari seperti sarana dan prasarana, sistem pelaporan, mekanisme dan SOP KB. d. <i>Product</i> : KB sudah sesuai dengan tujuan program KB yang mana hal ini dikarenakan adanya dukungan dari lingkungan setempat dan

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				diolah dengan baik oleh BKBP3A.
9.	Yolandie Kriel, Cecilia Milford, dan lain-lain. Jurnal Reproductive Health Vol. 16 No. 89. (2019). <i>“Male Partner Influence on Family Planning and Contraceptive Use: Perspective From Community Members and Healthcare Providers in KwaZulu-Natal, South Africa”</i>	Tujuan penelitian yang diambil adalah untuk mengetahui pengaruh dalam penggunaan KB dan kontrasepsi dalam partisipasi pria.	Menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya terdapat peran kompleks yang dipegang oleh pria dalam program KB dan kontrasepsi. Dinamika gender yang dipengaruhi oleh budaya dan pemahaman KB dan kontrasepsi merupakan faktor utama dalam penggunaan kontrasepsi. Pemikiran pria yang terbatas, kesalahpahaman mengenai efek samping KB dan kontrasepsi, dominasi pria dalam hubungan dan terdapat pelecehan fisik merupakan faktor-faktor yang berkontribusi dalam penggunaan KB. Dukungan sosial, informasi yang memadai dan tanggungjawab bersama menjadi strategi yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pria dalam penggunaan KB dan kontrasepsi.

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Tekau B. Kaffi, Karen Weidert, Eralakazza Ouro B., dan lain-lain. Jurnal Global Health Science & Pacific Vol. 6 No. 2. (2018). <i>“Engaging Men in Family Planning: Perspective From Married Men in Lomé, Togo”</i> .	Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mendapatkan suatu wawasan mengenai cara apa yang akan dilakukan dalam melibatkan pria dalam program KB di masa depan di Lomé, Togo.	Peneliti menggunakan metode kualitatif.	Dari penelitian yang telah dilakukan, mereka menemukan hasil bahwasannya pria memiliki pandangan khusus mengenai program KB. Hal ini berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai bagaimana dan mengapa perempuan menggunakan kontrasepsi. Beberapa lelaki memang merasa keberatan tetapi ada juga yang memberikan respon positif mengenai program KB. Terdapat beberapa hambatan dalam keikutsertaan program KB dalam penelitian ini, yaitu sosial ekonomi mendorong pria untuk melakukan program KB, pria tidak setuju jika pihak perempuan menggunakan program KB dengan keputusan sepihak, kesalahpahaman mengenai metode modern dapat menghambat dukungan program KB, pilihan metode yang terbatas untuk pria, tempat layanan yang tidak memadai dan sosialisasi yang

No.	Peneliti, Tahun dan Judul	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				sedikit dalam menargetkan pria dalam program KB. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pria yang disarankan dalam penelitian ini yaitu memberikan perhatian yang khusus kepada pria, mendidik laki-laki mengenai manfaat sosial-ekonomi dan kesehatan jika menggunakan program KB dan memberikan sosialisasi kepada pasangan suami istri yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai jurnal, 2022

Seluruh penelitian mengungkapkan hal yang sama yakni mengenai program KB yang tidak dapat terlepas dari partisipasi antara pria dan wanita. Berdasarkan beberapa sumber jurnal nasional yang telah diolah oleh peneliti masih terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang partisipasi pria dalam program KB dalam kategori yang “rendah”. Dari kelima jurnal nasional yang sudah diolah tersebut, hasil penelitian mengatakan bahwa peran perempuan lebih banyak daripada peran pria dalam penggunaan program KB. Beberapa faktor yang menyebabkan minimnya peran pria daripada wanita sudah dijelaskan pada beberapa jurnal diatas, yang mana faktor penyebab minimnya angka pengguna KB pria antara lain: (a) Pria merasa takut untuk menggunakan KB; (b) Alat

kontrasepsi yang mahal; (c) Menyebabkan kejantanan mereka berkurang; (d) Menjadi gunjingan masyarakat; dan (e) Rendahnya pengetahuan dan persepsi pria mengenai program KB. Beberapa jurnal juga melakukan evaluasi program KB yang mana hasil dari evaluasi tersebut juga mengatakan bahwa peran pria sangat minim. Tak hanya peran pria yang sangat minim, masih terdapat beberapa hal yang menyebabkan program KB belum dapat berjalan dengan baik, yaitu: (a) Minimnya keterlibatan kader; (b) Lokasi puskesmas yang sangat jauh; (c) Belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP); (d) Akses yang minim; dan (e) Kurangnya kontrol.

Selain jurnal nasional, penulis juga menggunakan jurnal internasional sebagai bahan untuk penelitian. Strategi-strategi yang disarankan dari beberapa jurnal internasional diatas, yaitu: (a) Dukungan sosial lebih ditekankan lagi; (b) Memberikan informasi yang memadai; (c) Menjadikan program KB tanggung jawab bersama; (d) Tak hanya wanita yang menggunakan program KB, tetapi pria juga menggunakan program KB ini; dan (e) Diadakannya Pendidikan Seksualitas Komprehensif. Dalam penelitian yang berjudul *“Evaluation of Family Planning Programs in Minahasa Regency”* yang melakukan evaluasi kebijakan program dengan model *Context, Input, Process, Product* menjelaskan bahwa program KB yang berjalan sudah baik dikarenakan banyak faktor pendukung, seperti kebutuhan penunjang program sudah ada, partisipasi masyarakat, ketersediaan berbagai sumber daya, program KB sudah berjalan sesuai SOP, mekanisme dan waktu pelaksanaan berjalan sesuai peraturan, sarana dan prasarana yang memadai dan adanya sistem pelaporan program KB.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki tema yang sama yaitu berkaitan dengan program Keluarga Berencana (KB), sembilan dari sepuluh penelitian menggunakan metode yang sama dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian yang mengatakan kurangnya atau masih rendahnya partisipasi pria dalam program KB. Sedangkan untuk perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini ingin berfokus pada partisipasi metode pria dalam program KB dan meneliti pengaruh faktor sosial budaya terhadap partisipasi metode pria dalam program KB.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi publik adalah ketika seseorang dan sumberdaya melakukan suatu proses yang kemudian diformulasikan, diimplementasikan lalu dikelola keputusan tersebut dalam kebijakan publik. Mereka juga menambahkan bahwa administrasi publik juga termasuk *science and art* yang mempunyai kegunaan untuk melaksanakan kebutuhan yang telah direncanakan (Chandler dan Plano dalam Keban, 2019:3).

Administrasi publik merupakan proses politik yang merupakan suatu metode guna mengatur suatu negara dan isinya yang merupakan cara pemerintah untuk terciptanya negara yang makmur yang sesuai dengan norma hukum yang sudah berlaku. Hal ini justru menunjukkan administrasi publik terus berkembang dan jika dipisahkan dari proses politik menjadi sulit.

Menurut Keban (2019:5) administrasi publik merupakan konsep yang mengarah ke dalam penguatan terhadap masyarakat dengan cara

mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian, yang dalam hal ini para birokrat memberikan hak penuh untuk masyarakat untuk lebih berkembang ke arah pemberdayaan yang berupaya untuk memfasilitasi agar mampu mengatur hidupnya secara mandiri. Hal ini pada akhirnya memungkinkan masyarakat untuk memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam menentukan kebutuhan hingga tahap pelaksanaan dan tahap hasil evaluasi, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator saja.

Administrasi publik menjelaskan administrasi sebagai sesuatu hal yang berada dalam lingkungan pemerintahan. Administrasi publik biasanya juga disebut dengan administrasi negara, karena terjemahan dari kata *public administration*. *Public* bila diterjemahkan akan berarti masyarakat, yang memiliki makna pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Kemudian pemerintahannya dibagi menjadi tiga, yaitu : yudikatif, eksekutif dan legislatif dan memiliki hubungan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintahan, dan maka dari itu disebut dengan proses politik. Kemudian hal ini memiliki kedekatan atau hubungan yang erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Keban, 2019:5-6).

Nicholas Henry dalam Keban (2019:6) mengatakan administrasi publik merupakan hal yang kompleks dari gabungan sebuah praktik dengan teori yang mana terdapat tujuan dalam memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakat agar kebutuhan masyarakat dapat didorong dengan adanya kebijakan publik.

Beberapa penjelasan mengenai definisi administrasi publik sudah dipaparkan diatas dan dapat disimpulkan bahwa administrasi publik yaitu beberapa kelompok maupun organisasi yang bekerja sama dalam melaksanakan perintah atau aturan dari pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sebuah tujuan.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Kuhn dalam Keban (2019:31) menjelaskan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar atau cara memecahkan sesuatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Henry dalam Keban (2019:31) menjelaskan terdapat lima paradigma dalam administrasi publik, yakni:

1. Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 – 1926)

Goodnow menjelaskan bahwasannya politik harus dipusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari rakyat, sedangkan administrasi memberi perhatiannya pada implementasi kebijakan. Politik dan administrasi kemudian dipisah menjadi tiga badan, yakni badan legislatif yang mempunyai tugas untuk mengekspresi kehendak rakyat, badan eksekutif yang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kehendak tersebut dan badan yudikatif yang mempunyai tugas untuk membantu legislatif untuk menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Dalam paradigma ini hanya menekankan lokus saja yakni *government bureaucracy* dan fokus dalam paradigma ini kurang terperinci.

2. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Prinsip-prinsip administrasi dikenalkan oleh beberapa tokoh yakni Willoughby, Gullick & Urwick, Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai suatu fokus administrasi publik, yang mana dalam prinsip tersebut dituangkan dalam POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*). Sedangkan dalam lokus paradigma ini adalah tidak digambarkan dengan jelas dikarenakan prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja.

3. Paradigma 3: Administrasi Negara (1950 – 1970)

Paradigma ini memiliki pertentangan dikarenakan timbulnya pertanyaan antara pemisahan politik dan administrasi, yang mana hal ini dijelaskan oleh Morstein Mark dalam buku "*Elements of Public Administration*". John Gaus kemudian menekankan bahwa teori administrasi publik merupakan teori politik juga. Maka dari itu kemudian muncul paradigma yang mana lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan dan fokus dari paradigma ini menjadi lemah dikarenakan prinsip-prinsip administrasi publik yang kabur. Paradigma ini membuat administrasi publik menjadi krisis identitas dikarenakan ilmu politik dianggap disiplin yang dominan dalam dunia administrasi publik.

4. Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956 – 1970)

Paradigma ini memiliki yakni perilaku organisasi, riset operasi, analisis sistem, penerapan teknologi modern, analisis manajeemen dan perilaku organisasi. Dalam paradigma ini memiliki dua arah perkembangan yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni dan kebijakan publik. Lokus dalam

paradigma ini tidak terlalu jelas dikarenakan tidak hanya diterapkan di dunia bisnis tetapi juga bisa di dunia administrasi publik.

5. Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Paradigma ini sudah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus dalam paradigma ini adalah kebijakan publik, teori organisasi dan teori manajemen. Sedangkan dalam lokus paradigma ini adalah masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma 6: *Governance*

Paradigma ini memiliki makna sebagai suatu sistem nilai, kelembagaan yang mencakup pengelolaan urusan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan politik dan kebijakan. Paradigma ini menekankan proses dimana masyarakat sebagai warga negara atau kelompok yang dapat memperjuangkan kepentingannya, menjalankan hak dan kewajibannya dan menyediakan mediasi jika ada perbedaan yang muncul. Substansi yang diperoleh dari paradigma ini adalah adanya interaksi antara pemerintah dan pemerintah, serta sektor privat yang semakin kuat dalam mengimplementasikan serta membuat branding terkait *people-centered development* (Keban, 2014).

Sesuai dengan penelitian, paradigma yang diambil adalah paradigma yang kelima yakni paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Dimana dalam penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan publik khususnya evaluasi kebijakan publik dalam pembahasannya.

1.6.4. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Ruang lingkup administrasi publik merupakan ruang lingkup yang sangat berbelit-belit tetapi hal ini juga tergantung dengan kebutuhan dan gerak masalah

yang dihadapi oleh masyarakat. Nicolas Henry dalam Keban (2019:8-9) memberikan beberapa ruang lingkup administrasi publik yang meliputi unsur-unsur:

1. Organisasi Publik

Organisasi publik pada prinsipnya berkaitan dengan pola organisasi, dan karakter birokrasi. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu organisasi pasti memiliki ciri khas yang membedakan dengan organisasi lainnya. Selain itu, di dalam organisasi juga memiliki anggota yang memiliki sikap atau perilaku yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi birokrasi.

2. Manajemen Publik

Manajemen publik pada dasarnya berkaitan dengan sistem dan ilmu manajemen dalam mengatur suatu kegiatan organisasi. Selain itu, suatu kegiatan organisasi juga harus dilakukan evaluasi program agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Manajemen publik disini juga berkaitan dengan bagaimana organisasi mencapai produktivitas, menyusun biaya publik, dan mengelola sumber daya manusianya.

3. Implementasi

Implementasi berkaitan erat dengan pendekatan kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi. Dalam implementasi, suatu kebijakan diukur melalui penilaian keberhasilan dengan membandingkan harapan dengan kenyataan setelah adanya kebijakan tersebut. Sehingga, nantinya diperoleh hasil dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diterapkan.

Pandangan dari Nicholas Henry menggambarkan bahwa ruang lingkup administrasi publik merupakan unsur-unsur yang ada di dalam kegiatan administrasi publik. Sedangkan menurut Pasolong (2008:21) menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi publik yang terbagi menjadi delapan, yaitu etika administrasi publik, manajemen publik, birokrasi publik, kinerja, kepemimpinan, administrasi kepegawaian negara, pelayanan publik dan kebijakan publik. Jadi, ruang lingkup administrasi publik secara garis besar meliputi manajemen publik dan kebijakan publik yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya di dalam organisasi publik.

1.6.5. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Miriam Budiarjo dalam Ali (2017:7) menjelaskan bahwa kebijakan dilakukan atas dasar kehendak kekuasaan yang mana kebijakan menjadi alat untuk mewujudkan kehendak melalui tata aturan yang diperlakukan. Sedangkan kebijakan menurut Sahya Anggara (2018:14) merupakan suatu ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang yang nantinya dari pembuat maupun yang menaatinya.

Sedangkan Jenkin dalam Wahyu Adi (2019:74) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan ditunjuk oleh aktor maupun beberapa aktor yang dimana keputusan tersebut masih dalam batasan kewenangan kekuasaan aktor atau beberapa aktor tersebut. James E. Anderson dalam Sahya Anggara (2018:38) menjelaskan mengenai kebijakan publik sebagai berikut:

“*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”, yaitu kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintahan.

Menurut Pennen dalam Muhammad (2019:71) kebijakan publik merupakan tindakan berupa opsi untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan *input* yang tersedia, berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau luar pemerintahan.

Nugroho dalam Sahya Anggara (2018:39) menjelaskan prinsip-prinsip kebijakan publik dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan yang dibagi menjadi tiga cara, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan bukan suatu hal yang mudah. Terdapat beberapa proses penting dalam sistem kebijakan publik (Dunn dalam Shaya Anggara, 2018:47), yaitu:

a. Kebijakan publik (*public policies*)

Suatu keputusan yang berhubungan dengan satu sama lain yang mana dibuat oleh badan atau kantor pemerintah yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*)

Suatu pelaku kebijakan yakni individu maupun kelompok yang mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environments*)

Suatu keadaan yang melatarbelakangi timbulnya suatu permasalahan dalam kebijakan yang mempunyai pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan kebijakan publik tersebut.

William N. Dunn (2013:24) mengatakan ada beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik, yaitu:

- a. Tahap penyusunan agenda merupakan tahapan dari beberapa masalah yang ada, para birokrat memilih salah satu permasalahan yang harus segera ditangani.
- b. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan setelah beberapa masalah dipilih, kemudian para birokrat mencari bagaimana mengatasi permasalahan tersebut (mencari alternatif guna memecahkan masalah yang ada). Setelah sudah bertemu dengan cara mengatasi permasalahan tersebut, maka beberapa cara kemudian dipilih lagi agar dapat menemukan kebijakan yang akan menangani permasalahan dengan baik.
- c. Tahap adopsi kebijakan merupakan tahapan yang setelah alternatif kebijakan telah ditetapkan maka perlunya dukungan dari mayoritas legislatif dan adanya keputusan peradilan.
- d. Tahap implementasi kebijakan merupakan alternatif kebijakan yang kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau digunakan agar permasalahan yang ada dapat segera teratasi.
- e. Tahap penilaian kebijakan merupakan tahapan setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, maka dilakukan proses evaluasi guna melihat sampai

sejauh mana kebijakan publik tadi, apakah mempunyai pengaruh yang baik dan dapat meraih tujuan yang ingin dicapai dalam mengatasi permasalahan atau malah jadi sebaliknya.

1.6.6. Evaluasi Program

Evaluasi merupakan suatu hasil yang dipelajari dari suatu program yang dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar lingkungan politik (Keban, 2019:79). Evaluasi nantinya melihat sejauh mana antara tujuan dengan kenyataannya. Suchman dalam Tiya Yulinda (2019:17), melihat evaluasi sebagai suatu pola yang nantinya akan menentukan hasil yang akan dicapai dengan beberapa kegiatan yang akan dilakukan kedepannya agar dapat mencapai tujuan.

Arikunto dalam Tiya Yulinda (2019:18) juga menjelaskan mengenai evaluasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai berjalannya sesuatu, yang tahap berikutnya informasi yang tadinya sudah didapatkan kemudian digunakan untuk menentukan suatu alternatif yang lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan.

Program merupakan suatu hal yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang nantinya dapat meningkatkan pembangunan suatu negara (Sumar dalam Ira Mingchilina, 2017:19), sedangkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 merupakan suatu perangkat yang dikerjakan pemerintah dalam menggapai tujuan dan sasaran tertentu dalam memperoleh dana

atau kegiatan-kegiatan yang diatur oleh pemerintah dan yang menjalankannya adalah masyarakat.

Program merupakan bentuk realisasi beberapa kegiatan dari suatu kebijakan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi atau kelompok dan terjadi secara berkesinambungan. Terdapat tiga unsur dalam suatu program, yakni:

1. Melibatkan beberapa orang dalam suatu organisasi.
2. Bentuk implementasi dari suatu kebijakan.
3. Terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar.

Westra dalam Nurhanifa (2016:48) menjelaskan mengenai pengertian program yang merupakan suatu rumusan yang memuat gambaran suatu pekerjaan yang nantinya akan dilaksanakan dengan adanya tata cara pelaksanaannya. Bintoro dalam Nurhanifa (2016:48) menambahkan ada beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya tujuan yang jelas.
- b. Perlunya upaya dibidang manajemen agar program terlaksana dengan baik.
- c. Perlunya hubungan antara program yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan program tidak bisa berdiri dengan sendirinya.
- d. Perlu dilakukannya pengukuran biaya yang nantinya dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang dihasilkan.
- e. Menentukan alat yang baik agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi program menurut Sukardi dalam Tri Yulinda (2019:19) yaitu tahapan dimana mencari informasi kemudian dianalisis menjadi suatu kegiatan luas dan komprehensif yang nantinya untuk mengambil keputusan terkait dengan program yang dinilai. Evaluasi kebijakan memiliki manfaat bagi pengambil keputusan dikarenakan evaluasi nantinya dapat memberikan masukan atau informasi. Wujud dari hasil evaluasi adalah rekomendasi dari evaluator untuk pengambilan keputusan.

Suharsmi Arikunto dalam Muh. Firyal dan Widya (2018:38) menjelaskan mengenai evaluasi program yang merupakan suatu proses penetapan secara sistematis mengenai tujuan, nilai dan kecocokan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Proses penetapan tujuan tersebut dilakukan dengan perbandingan yang hati-hati terhadap data yang sudah diobservasi dan telah menggunakan standard yang sudah dibakukan. Sedangkan menurut Cronbach dan Stufflebeam dalam Muh. Firyal dan Widya (2018:37) mengartikan evaluasi program sebagai upaya yang dilakukan guna mencari suatu informasi yang mana nantinya akan diberitahukan kepada pengambil keputusan.

William Dunn (2003:608) menjelaskan mengenai evaluasi yakni suatu hal yang berhubungan dengan aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang dapat menyatakan usaha untuk menganalisis hasil dari kebijakan maupun program. Pengertian yang lebih spesifik yakni evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, evaluasi program merupakan kegiatan mengumpulkan informasi agar dapat mengetahui apakah program yang sudah dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum.

Arikunto dalam Tiya Yulinda (2019:22) menjelaskan ada beberapa kemungkinan setelah kebijakan sudah di evaluasi, antara lain:

- a. Program dihentikan, hal ini dikarenakan program tidak bisa berjalan dengan baik dan tidak mempunyai manfaat atau hasil.
- b. Revisi program, hal ini dikarenakan program hanya memiliki sedikit kesalahan, maka dari itu program yang salah diperbaiki tetapi tidak sampai menghentikan program.
- c. Program berlanjut, hal ini dikarenakan program dirasa bisa berjalan dengan baik dan memiliki manfaat atau hasil yang bagus.
- d. Program disebarluaskan, hal ini dikarenakan program sudah mendapatkan hasil yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan, maka program dilaksanakan di wilayah lain.

Dalam buku Riant Nugroho (2003:609-610) yang dikutip dari pendapat William N. Dunn menjelaskan mengenai fungsi-fungsi evaluasi, yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan ini dapat memberikan suatu alternatif kebijakan yang nantinya dapat digunakan untuk kebijakan berikutnya atau dapat diganti dengan yang lain.
- b. Evaluasi kebijakan memberikan inovasi dalam hal perumusan masalah dan rekomendasi dalam metode analisis kebijakan nantinya.

- c. Evaluasi kebijakan memberikan informasi mengenai tujuan dan target dalam kebijakan tersebut apakah sudah tercapai atau belum. Informasi ini dinilai melalui tindakan publik.
- d. Evaluasi kebijakan menilai apakah kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. tujuan dan sasaran dalam hubungan dengan masalah yang akan dituju, yang mana hal ini nantinya akan diberikan nilai yang mendasar sesuai dengan indikator.

Menurut William N. Dunn dalam Nila Alfiyatul (2015:24) menjelaskan mengenai beberapa tujuan dalam suatu evaluasi, yakni:

- a. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan.
- b. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan.
- c. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi digunakan untuk mengukur suatu dampak positif maupun dampak negatif.
- d. Untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan yakni dengan cara membandingkan tujuan dan sasaran dengan capaian target.
- e. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi yakni memberikan masukan untuk proses kebijakan di masa yang akan datang agar kebijakan menjadi lebih baik.
- f. Sebagai bahan ukuran tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan/program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah kebijakan/program berhasil maupun gagal dalam mencapai tujuan dan

mengantisipasi kegagalan yang sama di masa yang akan datang, maka diperlukan evaluasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan/program tersebut.

1.6.7. Indikator Evaluasi Kebijakan

Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur keberhasilan dalam suatu program. Evaluasi kebijakan yang sudah dijelaskan oleh William Dunn dalam Nugroho (2003:186) memiliki enam kriteria evaluasi, yaitu:

a. *Effectiveness* (Efektivitas)

Efektivitas menjelaskan mengenai kebijakan yang berjalan sudah sinkron dengan tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

b. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi menjelaskan mengenai usaha yang diperlukan yang dapat diamati dari sumber daya yang sudah dimiliki dalam melakukan suatu tujuan efektivitas tertentu.

c. *Adequacy* (Kecukupan)

Kecukupan menjelaskan mengenai tentang suatu alternatif yang dapat mewujudkan kebutuhan yang dipermasalahkan secara maksimal.

d. *Equity* (Pemerataan)

Pemerataan menjelaskan mengenai tentang kriteria yang dapat terpenuhi apabila kebijakan atau program dapat menciptakan distribusi yang adil dan wajar untuk masyarakat.

e. *Responsiveness* (Responsivitas)

Responsivitas merupakan tanggapan dari masyarakat maupun pemerintah mengenai kebijakan atau program yang sudah berjalan tersebut sudah memuaskan dan sesuai dengan nilai-nilai dalam suatu kelompok masyarakat. Kriteria suatu responsivitas merupakan suatu hal yang penting dikarenakan jika terdapat kebijakan atau program yang baik tetapi tidak dapat memahami nilai dan memenuhi kebutuhan dalam suatu masyarakat maka kebijakan atau program tersebut dapat dikatakan gagal. Tak hanya respon dari masyarakat saja, respon dari pelaksana juga penting dikarenakan dapat dilihat dari koordinasi antara pelaksana dengan program atau kebijakan yang dijalankan.

f. *Appropriateness* (Ketepatan)

Ketepatan merupakan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ketepatan ini kemudian ini berhubungan dengan nilai dari tujuan suatu kebijakan atau program.

Bridgman dan Davis dalam Tiya Yulinda (2019:24) menjelaskan terdapat beberapa indikator dalam evaluasi, yaitu:

a. *Input*

Indikator ini nantinya memfokuskan penilaiannya terhadap sumber daya pendukung dan bahan dasar yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. *Input* nantinya meliputi sumber daya manusia, dana dan infrastruktur.

b. *Process*

Indikator ini nantinya memfokuskan penilaiannya terhadap bagaimana kebijakan diganti dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. *Process* nantinya meliputi efektivitas dan efisiensi yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan.

c. *Outputs*

Indikator ini nantinya memfokuskan penilaiannya terhadap hasil atau produk yang dihasilkan oleh proses kebijakan publik. *Outputs* nantinya meliputi partisipasi masyarakat dalam mengikuti kebijakan tersebut.

d. *Outcomes*

Indikator ini nantinya memfokuskan penilaiannya terhadap dampak yang sudah diterima oleh masyarakat.

Penelitian Evaluasi Program KB dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan indikator evaluasi dari William Dunn sebagai acuan untuk mengamati dan mengukur keberjalanan program tersebut. Penelitian ini akan menggunakan indikator evaluasi kebijakan dari William Dunn yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

1.6.8. Program Keluarga Berencana

Suatu program kebijakan yang menggabungkan dan mendorong suatu kelompok masyarakat agar mau ikut serta dan berperan dalam mengupayakan standar keluarga kecil yang bahagia yang mana dapat ditingkatkan melalui sumber daya manusia dengan cara pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran,

meningkatkan adaptasi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan program KB yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.

Program KB merupakan satu dari beberapa program pembangunan nasional yang penting dalam proses mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Yulizawati (2019:33) menjelaskan mengenai Keluarga Berencana yaitu usaha yang dilakukan guna mencapai kesejahteraan dengan memberikan gagasan mengenai perkawinan, penjarangan kelahiran dan pengobatan kemandulan. Sedangkan Hartanto dalam Yulizawati (2019:33) juga menambahkan penjelasan mengenai KB yakni tindakan untuk membantu suatu individu maupun pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur jarak kelahiran dan mendapatkan kelahiran yang diinginkan.

World Health Organization mengatakan tentang keluarga berencana merupakan program yang memiliki tujuan dalam membantu pasangan suami-istri (pasutri) menghindari kelahiran anak yang tidak perlu, menjaga jarak kehamilan pertama dengan kehamilan selanjutnya, menentukan waktu kelahiran dan agar bisa menentukan berapa jumlah yang diinginkan dalam keluarga tersebut. Menurut Ratu Maharani, dkk (2018:22) menjelaskan KB yang merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan memberikan nasehat mengenai perkawinan, pengobatan kemandulan dan penjarangan kelahiran. KB merupakan suatu proses yang dilakukan pasangan suami istri untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kelahirannya.

Rosita (2019:16) menjelaskan mengenai program KB yang merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dalam hal ini nantinya, dalam suatu keluarga jika ingin membatasi kelahiran yakni dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, pil, implant, MOW, MOP, IUD, tubektomi dan vasektomi.

Tujuan dari program KB sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 yaitu membangun keharmonisan dan keseimbangan dalam kebijakan kependudukan, mendorong pembangunan nasional dan daerah dari perspektif kependudukan dan agar terwujud pertumbuhan penduduk melalui dengan dibentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sedangkan dalam tujuan khususnya adalah untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi, mengurangi angka kelahiran, untuk meningkatkan pelayanan KB agar lebih berkualitas, menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan menanggulangi permasalahan kesehatan reproduksi (Rosita, 2019:18).

Dalam program KB memiliki enam ruang lingkup, yakni: (a) Pelayanan infertilitas; (b) Pendidikan seks; (c) Komunikasi informasi dan edukasi; (d) Konseling; (e) Konsultasi genetik; dan (f) Konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan. Dalam segi kesehatan, program KB memiliki manfaat untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kesakitan yang semakin tinggi akibat kehamilan yang dialami wanita/istri.

Terdapat dua sasaran dalam program KB, yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini sasaran langsung yakni Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki tujuan agar angka kelahiran menjadi menurun yaitu dengan

menggunakan alat kontrasepsi berkelanjutan, sedangkan sasaran tidak langsung yaitu menurunkan angka kelahiran dengan cara pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu (Handayani dalam Yulizawati, 2019:34).

Program ini diawasi dan digerakkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tugas pokok BKKBN sendiri adalah memantapkan kegiatan keluarga berencana nasional, membuat kebijakan tentang gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan menyelaraskan pelaksanaannya, mengembangkan dan kemudian memantapkan pelaksanaan kebijakan kependudukan secara terstruktur.

Manfaat program KB menurut WHO dalam Rosita (2019:19) adalah:

a. Perlambatan pertumbuhan penduduk

Kunci dari melambatnya pertumbuhan penduduk adalah dengan menggunakan KB. KB ini nantinya tidak memberikan dampak negatif yang berkelanjutan bagi lingkungan, ekonomi dan dalam upaya pembangunan nasional maupun regional.

b. Mengurangi kehamilan remaja

Wanita yang hamil dengan usia yang terbilang muda cenderung memiliki bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan angka kematian neonata yang tinggi.

c. Mencegah kesehatan terkait dengan kehamilan

Wanita dapat memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil. KB dapat digunakan untuk menunda, membatasi dan menjaga jarak kehamilan yang memiliki risiko masalah kesehatan dan kematian, apalagi bagi wanita yang masih diusia yang muda.

- d. Membantu mencegah *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*

Dapat mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan wanita yang mengidap HIV, yang mana dapat mengurangi bayi yang terinfeksi. Alat kontrasepsi kondom pria maupun wanita dapat memberikan perlindungan yang lebih terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan juga terhadap HIV maupun IMS.

- e. Mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB)

KB dapat digunakan untuk mencegah kehamilan dan kelahiran yang mempunyai jarak yang dekat dan tidak tepat waktu. Mengurangi bayi dengan ibu yang meninggal akibat melahirkan yang mana juga memiliki risiko kematian yang besar dan kesehatan yang buruk.

1.6.9. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari gabungan kata “kontra” yang berarti melawan dan “konsepsi” yang berarti pertemuan antara sel telur yang matang dengan sperma yang mengakibatkan kehamilan atau menghindari terjadinya kehamilan. Maka dari itu, kontrasepsi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencegah kehamilan, usaha pencegahan ini bisa dilakukan untuk sementara maupun permanen (Ratu Maharani, dkk, 2018:25).

Wiknjosastro (2007) menjelaskan bahwa terdapat efektivitas kontrasepsi yang dibagi menjadi dua, yaitu : (a) Efektivitas teoritis yang merupakan cara menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan dengan mengikuti cara pemakaian

yang benar; dan (b) Efektivitas pemakaian yaitu cara menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan dengan tidak mengikuti aturan pemakaian yang tertera.

Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pemakaian alat kontrasepsi seseorang, yaitu : (a) Ekonomi; (b) Pendapatan; (c) Pengetahuan; (d) Usia; (e) Tingkat pendidikan seseorang; (f) Tarif pelayanan; (g) Persetujuan antara kedua belah pihak antara pasangan; dan (h) Ekonomi.

Ada beberapa macam dari alat kontrasepsi sendiri, metode alat kontrasepsi dibagi menjadi beberapa (Yulizawati, 2019:48), yaitu :

a. Metode Kontrasepsi Sederhana

Kontrasepsi sederhana merupakan pencegahan kehamilan yang dilakukan dengan cara yang sederhana atau sewaktu-waktu, bahkan hanya digunakan sekali pada saat melakukan hubungan seksual. Metode kontrasepsi sederhana dibagi menjadi dua yakni dengan cara kontrasepsi menggunakan alat/obat dan tanpa menggunakan alat/obat.

Metode kontrasepsi sederhana yang menggunakan alat ada beberapa macam yaitu kondom, spermisida dan diafragma. Sedangkan metode kontrasepsi tanpa menggunakan alat/obat adalah coitus interruptus atau senggama terputus dan metode kalender.

b. Metode Kontrasepsi Darurat

Metode kontrasepsi ini dapat digunakan untuk mencegah kehamilan bisa digunakan setelah hubungan seksual atau biasa disebut dengan “Kontrasepsi Pasca Senggama” atau “*Morning After Pills*” atau “*Morning After Treatment*”. Metode ini dinamakan metode kontrasepsi darurat dikarenakan harus segera digunakan

setelah melakukan hubungan seksual dan tidak boleh ditunda. Penggunaan metode ini dinilai kurang efektif jika dibandingkan dengan metode KB yang lain.

Ada beberapa jenis metode kontrasepsi darurat yaitu mekanik dan medik. Efek samping yang akan timbul ketika melakukan metode ini adalah bisa timbul rasa mual, sakit kepala, pusing, muntah dan payudara tegang. Efek ini bisa muncul dikarenakan metode ini mengandung hormone dengan dosis tinggi. Tetapi efek samping ini tidak timbul lebih dari 24 jam.

c. Metode Kontrasepsi Masa Postpartum

Metode kontrasepsi ini memiliki beberapa macam, yakni:

1. Metode Amenorea Laktasi (MAL) merupakan metode ini merupakan metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan ASI secara eksklusif. Metode ini dinilai metode yang alamiah karena tidak menggunakan kontrasepsi lain. Efektivitas dari metode ini sangat besar yakni sekitar 98% bila digunakan secara benar dan sesuai dengan persyaratan.
2. IUD/AKDR Post Partum merupakan metode ini bisa dipasang saat pascaplasenta, segera pascasalin, pascasalin tertunda dan internal-pascasalin lanjutan. Efektivitas dari metode ini adalah kejadian hamil yang tidak diinginkan pada pasca insersi IUD post plasenta sebanyak 2.0 – 2.8 per 100 akseptor pada 24 bulan setelah pemasangan.

d. Metode Kontrasepsi Hormonal

Metode ini memiliki beberapa macam yakni KB suntik, kontrasepsi oral kombinasi dan KB pil. Metode kontrasepsi hormonal yaitu adanya folikel dan

ovulasi yang terganggu karena estrogen dan progesterone berbagi umpan balik ke kelenjar pituitari melalui hipotalamus (Manuaba, 2010).

e. Metode Kontrasepsi Non Hormonal

Metode ini sangat efektif (0,6-0,8 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun penggunaan pertama, 1 kegagalan dalam 125-170 kehamilan) dan dapat digunakan sampai 10 tahun. Ada beberapa jenis dari metode kontrasepsi non hormonal ini yaitu AKDR CuT-380A dan AKDR lain yang beredar di Indonesia ialah NOVA T (*Schering*).

f. Metode Kontrasepsi Operatif

Metode kontrasepsi operatif memiliki beberapa macam, yakni:

1. Kontrasepsi Mantap: Metode KB yang paling murah, efektif dan aman.
2. Tubektomi: Metode ini memerlukan teknik bedah yang nantinya dapat menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur.
3. Vasektomi: Metode ini memerlukan teknik bedah dan termasuk metode yang permanen yakni tidak ingin memiliki anak lagi.

Alat kontrasepsi dibedakan menjadi dua yaitu alat kontrasepsi untuk wanita dan alat kontrasepsi pria (Marmi dalam Rosita, 2019:21-31):

1. Alat kontrasepsi untuk wanita

a. Implan

Alat kontrasepsi yang terbuat dari silikon yang berbentuk kapsul kecil yang memiliki panjang kurang lebih 3 cm dan mengandung hormon progestin. Implan dimasukkan ke dalam kulit lengan bagian atas.

Kelebihan dari penggunaan implant adalah metode ini tidak mempengaruhi produksi ASI, bisa dicabut kapanpun dan setelah dicabut pengembalian kesuburan lebih cepat. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah tidak dapat mencegah IMS, menyebabkan perubahan pola haid tetapi hanya sementara dan adanya keluhan nyeri dan mual.

b. Suntik KB

Suntik KB mempunyai dua jenis yang dibedakan menurut kandungan didalamnya. Yang pertama, suntik progestin yang memiliki hormon progesteron. Suntik progestin ini dapat mencegah terjadinya ovulasi. Yang kedua yaitu suntik KB kombinasi yaitu yang kandungan didalamnya campuran dari hormon progesteron dan hormon estrogen.

c. Tubektomi

Tubektomi merupakan metode kontrasepsi dengan cara memotong kedua saluran telur, yang mana metode ini dilakukan karena sudah tidak ingin memiliki anak lagi.

Keuntungan dari tubektomi adalah sangat efektif, permanen, tidak mempengaruhi produksi ASI, tidak menimbulkan efek samping dalam jangka panjang, fungsi seksual tidak mengalami perubahan dan tidak ada efek samping hormonal. Sedangkan kerugian dari tubektomi adalah menimbulkan rasa sakit setelah tindakan, tidak melindungi terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS), harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan bisa menyebabkan rasa penyesalan di kemudian hari (Yulizawati, 2019:87-88).

d. IUD (*IntraUterine Devices*)

IUD berbentuk macam-macam, ada yang terbuat dari plastik, dililit tembaga, ada yang dililit dengan tembaga bercampur tembaga dan ada yang didalam batangnya diisi dengan hormon progesteron. Shukla, dkk dalam Yulizawati (2019:68) IUD dipasang pada 10 menit setelah plasenta lahir sampai 48 jam *post partum*.

Efektivitas IUD yaitu kejadian hamil yang tidak diinginkan pada pasca insersi IUD post plasenta sebanyak 2.0 – 2.8 per 100 akseptor pada 24 bulan setelah pemasangan. Pada 1 tahun setelahnya, penelitian menemukan angka kegagalan IUD post plasenta 0.8%, dibandingkan dengan pemasangan setelahnya. Keuntungan pemasangan IUD segera pascaplasenta yakni biaya lebih murah, lebih sedikit keluhan daripada pemasangan setelah beberapa hari/minggu dan tidak mengganggu produksi ASI. Sedangkan efek sampingnya yaitu dapat terjadi robekan dinding Rahim, munculnya nyeri dan memungkinkan terjadinya infeksi. (Yulizawati, 2019:70)

e. Pil KB

Pil KB memiliki efektivitasnya sebanyak 98.5%. keuntungan menggunakan pil KB adalah tidak menurunkan produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, cocok untuk perempuan yang tidak biasa mengkonsumsi estrogen, kesuburan cepat kembali, sangat efektif untuk masa laktasi. Sedangkan kerugiannya adalah memerlukan biaya, harus selalu tersedia, efektivitas berkurang apabila menyusui juga berkurang, harus diminum setiap hari diwaktu yang sama,

tidak melindungi dari penyakit menular seksual termasuk HBV dan HIV/AIDS (Yulizawati, 2019:81).

Alat kontrasepsi ini berupa obat yang diminum atau ditelan yang berisi hormon estrogen dan hormon progesteron. Pil KB dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pil KB Progestin: pil ini mempunyai kandungan hormon progesteron. Pil ini aman untuk ibu menyusui maka dari itu pil ini juga biasa disebut dengan pil menyusui. Pil ini mempunyai efektivitas 92-99% dengan syarat diminum setiap hari dan senggama dilakukan 3-20 jam setelah minum pil. Efek dari pil ini adalah efek hormonal seperti dapat mempengaruhi nafsu makan. Kelemahan dari pil ini tidak dapat melindungi dari IMS.
2. Pil KB Kombinasi: pil ini mempunyai kandungan campuran antara estrogen dan progesteron yang mana pil ini tidak cocok dikonsumsi oleh ibu yang sedang menyusui karena pil ini mempengaruhi produksi ASI.

f. Kondom Wanita

Kondom wanita ini berbentuk silinder yang dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita, yang mana kondom ini memiliki dua ujung yang nantinya akan menutupi ujung rahim tertutup (*inner*) dan ujung rahim terbuka (*outer*).

2. Alat Kontrasepsi Pria

a. Kondom

Kondom pria ini berbentuk selubung tipis yang memiliki panjang 10-15 cm yang terbuat dari karet dan juga memiliki pelumas. Kondom memiliki tingkat efektivitas sebanyak 80-95% dengan angka kegagalan 2-12 kehamilan per 100 perempuan setiap tahunnya.

Kelebihan dari kondom sendiri adalah tidak memiliki efek hormonal, penggunaan yang praktis, tidak mengganggu produksi ASI, murah dan dapat didapatkan di banyak tempat dan mencegah IMS. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat permasalahan dalam membuang kondom bekas pakai dan harus sudah tersedia setiap kali berhubungan seksual.

b. Vasektomi

Vasektomi merupakan alat kontrasepsi yang sistem kerjanya dengan cara menutup saluran sperma atau memotong saluran sperma agar sperma tidak keluar dari testis. Vasektomi memiliki tingkat efektivitas sebanyak 90% dengan angka kegagalan kurang dari 1%.

Kelebihan dari vasektomi adalah tidak mengganggu hubungan seksual, tidak memiliki efek samping hormonal dan teknik operasi yang sederhana dan hanya memerlukan waktu yang relatif cepat. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menimbulkan bekas operasi dan dapat menyebabkan komplikasi.

1.6.10. Partisipasi Pria dalam KB

Partisipasi pria dalam program KB merupakan salah satu isu yang penting dalam kesehatan reproduksi. Upaya peningkatan partisipasi pria dalam program KB tidak hanya tantangan bagi pemerintah dan BKKBN saja, tetapi juga menjadi tantangan bersama dikarenakan partisipasi pria dalam program KB masih rendah. Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menjelaskan bahwa partisipasi pria dalam program KB hanya 5 persen, hal ini dikarenakan pilihan alat kontrasepsi hanya kondom dan vasektomi.

International Conference for Population and Development (ICPD) dalam Yulizawati (2019:39) merekomendasikan mengenai perubahan paradigma KB Nasional. Perubahan paradigma tersebut mengenai konsep dan pelaksanaan program pengendalian kependudukan dan penurunan angka kelahiran yang berubah kearah pendekatan kesehatan reproduksi yang lebih memperhatikan hak reproduksi dan pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan gender.

Partisipasi pria dalam KB nantinya dapat memberikan dampak dan kontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk dan menangani masalah kesehatan reproduksi yang berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Menurut BKKBN partisipasi pria merupakan salah satu tanggung jawab pria dalam keterlibatannya di program KB, kesehatan reproduksi dan perilaku yang aman dan sehat untuk dirinya maupun pasangan dan keluarganya. Partisipasi pria dalam KB juga termasuk bentuk kepedulian pria. Beberapa metode yang bisa digunakan pria dalam KB, yaitu:

a. Vasektomi

Vasektomi merupakan alat kontrasepsi yang sistem kerjanya dengan cara menutup saluran sperma atau memotong saluran sperma agar sperma tidak keluar dari testis. Vasektomi memiliki tingkat efektivitas sebanyak 90% dengan angka kegagalan kurang dari 1%.

Kelebihan dari vasektomi adalah tidak mengganggu hubungan seksual, tidak memiliki efek samping hormonal dan teknik operasi yang sederhana dan hanya

memerlukan waktu yang relatif cepat. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menimbulkan bekas operasi dan dapat menyebabkan komplikasi.

b. Metode senggama terputus

Metode ini merupakan salah satu metode KB tradisional, yang mana pria nantinya mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi (Rosita, 2019:80). Efektivitas dari metode ini memiliki risiko kehamilan 4 di antara 100 ibu dalam satu tahun. Banyak orang menyukai metode ini dikarenakan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan, tidak ada efek samping dan tidak perlu mengeluarkan biaya.

c. Metode pantang berkala atau metode kalender

Metode ini tidak dilakukan hanya oleh suami/pria tetapi juga bersama dengan istri/wanita dengan tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Ogino (ahli ginekologi Jepang) dalam Yulizawati (2019:58) menjelaskan bahwa ovulasi tidak terjadi tepat 14 (empat belas) hari sebelum menstruasi tetapi terjadi 12 (dua belas) atau 16 (enam belas) hari sebelum menstruasi berikutnya.

Metode ini tidak efektif dikarenakan penentuan masa tidak subur tidak didasarkan pada siklus menstruasi sendiri, kurangnya pemahaman tentang hubungan masa subur/ovulasi dan penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi.

d. Alat kontrasepsi kondom

Kondom pria ini berbentuk selubung tipis yang memiliki panjang 10-15 cm yang terbuat dari karet dan juga memiliki pelumas. Kondom memiliki tingkat

efektivitas sebanyak 80-95% dengan angka kegagalan 2-12 kehamilan per 100 perempuan setiap tahunnya.

Kelebihan dari kondom sendiri adalah tidak memiliki efek hormonal, penggunaan yang praktis, tidak mengganggu produksi ASI, murah dan dapat didapatkan di banyak tempat dan mencegah IMS. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat permasalahan dalam membuang kondom bekas pakai dan harus sudah tersedia setiap kali berhubungan seksual.

Yulizawati (2019:39) menjelaskan mengenai partisipasi pria dalam program KB. Bentuk dari partisipasi pria kemudian dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Bentuk partisipasi pria secara langsung yaitu dengan cara menggunakan alat kontrasepsi, yaitu seperti kondom, metode senggama terputus, vasektomi dan metode pantang berkala. Sedangkan bentuk keikutsertaan pria secara tidak langsung yaitu dengan cara mendukung adanya program KB. Hal ini bisa dilakukan dengan cara: (a) Bersedia menggantikan peran istri dalam penggunaan KB, apabila kondisi kesehatan istri tidak memungkinkan; (b) Apabila terjadi komplikasi dalam penggunaan KB, mampu memberikan pertolongan atau mencari pertolongan; (c) Jika menggunakan metode pantang berkala dapat membantu dengan menghitung waktu subur; (d) Apabila alat kontrasepsi yang sedang digunakan tidak memuaskan, mampu mencari alternatif dalam penggunaan alat kontrasepsi; (e) Menemani dan mengantarkan istri ke fasilitas pelayanan untuk melakukan kontrol, pengecekan dan rujukan; (f) Membantu istri dalam menggunakan KB secara benar; dan (g) Dapat memilih alat kontrasepsi yang sesuai.

Partisipasi penggunaan program KB dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Bertrand (1994) menjelaskan tentang faktor pemakaian program KB, yaitu: (1) Permintaan KB; (2) Faktor sosial dan individu; (3) Faktor keinginan untuk memiliki anak dan nilai anak; (3) Faktor output pelayanan (*image*, akses, dan kualitas pelayanan) dan pemanfaatan pelayanan; (4) Program pembangunan; dan (5) Faktor intermediate (aborsi yang disengaja, anak lahir mati, umur pernikahan, mati haid, umur *menarche*, *fecundability*, dan *postpartum infecundability*). Pentingnya partisipasi pria dalam KB disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Pria merupakan pasangan wanita dalam kehidupan seksual dan reproduksi. Maka dari itu tanggung jawab pria dengan wanita seharusnya sejajar dan saling menjaga kesehatan reproduksi dan agar dapat mencegah penyakit komplikasi KB.
- b. Pria memegang keputusan reproduksi yang nantinya dapat membentuk ikatan yang lebih kuat dengan istri dan keturunannya dan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi untuk keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya.
- c. Pria terlibat dalam fertilitas yang mana juga memiliki peran penting dalam memutuskan kontrasepsi yang digunakannya maupun yang digunakan istrinya.

Beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi pria dalam KB masih rendah (Yulizawati, 2019:39) adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan metode kontrasepsi pria.
- b. Terbatasnya akses informasi dan aksesibilitas terhadap pelayanan KB pria.

- c. Adanya faktor lingkungan, sosial dan budaya, masyarakat dan keluarga yang memandang bahwa partisipasi pria dalam program KB tidak penting dan pelaksanaan program KB hanya untuk wanita saja.
- d. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pria dalam program KB.

1.6.11. Faktor yang Mempengaruhi Program

Keberhasilan suatu program dapat diketahui jika dilakukan identifikasi dan analisis terhadap suatu program. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap program maupun kebijakan tersebut, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan dalam lingkup pemerintah saja, namun kebijakan yang sudah dibuat tadi juga harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada dalam lingkup kebijakan yang dibuat. James Anderson juga menambahkan bahwasannya masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan kebijakan publik tersebut, hal ini dikarenakan:

- a. Masyarakat sadar untuk menerima kebijakan tersebut;
- b. Apabila tidak melaksanakan kebijakan tersebut dapat dikenakan sanksi;
- c. Mempunyai keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan telah dibuat melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- d. Sebagai bentuk menghormati terhadap otoritas dan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah;

Salah satu faktor pendukung dalam suatu kebijakan yakni perlunya dukungan dan dapat diterima oleh masyarakat. Apabila suatu program maupun kebijakan sudah ditaati dan diikuti oleh masyarakat maka suatu program maupun kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Bambang Sunggono dalam Chairika Nasution (2017:25) menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat dalam suatu keberjalanan kebijakan maupun program, yakni:

a. Isi kebijakan

Terdapat beberapa hal yang dapat menghambat suatu kebijakan maupun program dalam suatu isi kebijakan, yaitu tujuan yang sudah ditetapkan tidak cukup terperinci, kebijakan yang sudah siap untuk diimplementasikan masih banyak kekurangan, kurangnya ketepatan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan masih banyak kekurangan dalam sumber daya pembantu yakni dana, tenaga manusia maupun waktu.

b. Informasi

Informasi sangat penting dalam menyiapkan suatu kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Para pemegang peran dalam membuat suatu kebijakan yang terlibat langsung mempunyai informasi yang sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Apabila informasi tidak ada maka dapat menyebabkan gangguan dalam berkomunikasi.

c. Pembagian potensi

Pembagian potensi ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Jika dalam struktur organisasi tidak diatur dengan baik

maka dapat menimbulkan masalah apabila dalam pembagian wewenang kurang disesuaikan dengan pembagian tugas yang terdapat pembatasan pembatasan yang kurang jelas.

d. Dukungan

Apabila suatu pelaksanaan kebijakan maupun program tidak mempunyai dukungan yang cukup maka dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terhambat.

Darwin dalam Chairika Nasution (2017:27) menjelaskan terdapat beberapa faktor penghambat dalam suatu keberjalanan kebijakan maupun program, yakni:

a. Budaya

Aspek budaya merupakan aspek yang perlu diperhatikan hal ini dikarenakan jika suatu kebijakan dilaksanakan dan terjadi perubahan baik dalam finansial, cara maupun tempat dan lain sebagainya yang mana perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Maka dari itu pentingnya memperhatikan perubahan perilaku dari kelompok masyarakat. Banyak sekali pelaksanaan suatu kebijakan yang menuntut terjadinya perubahan perilaku yang mana seharusnya jika dalam membuat suatu kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang memiliki sedikit pengaruh pada perubahan perilaku kelompok masyarakat.

b. Kepentingan

Proses pelaksanaan suatu kebijakan seringkali menimbulkan permasalahan atau konflik dari kelompok sasaran maupun masyarakat, yang mana peluang

munculnya kelompok tertentu diuntungkan sedangkan dipihak lain pelaksanaan kebijakan tersebut justru dapat merugikan kelompok yang lain.

c. Aparat pelaksana

Pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang nantinya dapat mencegah kemungkinan terjadi perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik yang tengah dilaksanakan. Tak hanya itu, masyarakat juga perlu diberdayakan agar lebih kritis jika terdapat aparat yang menyimpang. Kualitas aparat dalam melaksanakan suatu kebijakan pun sering menjadi kendala khususnya menyangkut pelaksanaan kebijakakan yang memerlukan keterampilan khusus. Komitmen aparat pelaksana juga diperlukan guna membantu pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Anggaran

Program kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dikarenakan memiliki dukungan sumber daya yang memadai yang dapat berbentuk dana, peralatan teknologi maupun sarana prasarana lainnya. Jika dalam keberjalanan suatu kebijakan tidak mempunyai dukungan sumber daya yang baik maka keberjalanan suatu kebijakan dapat mengalami suatu kesulitan.

e. Azas manfaat

Suatu kebijakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah yang harus mempunyai manfaat dan tujuan yang baik bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika suatu kebijakan memiliki manfaat yang

baik bagi masyarakat maupun pemerintah maka dalam proses pelaksanaannya akan semakin mudah, begitu pun sebaliknya jika suatu kebijakan tidak memiliki manfaat yang jelas maka dalam proses pelaksanaannya akan semakin sulit dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

1.6.12. Faktor Sosial dan Budaya

Keberhasilan suatu program dapat diketahui jika dilakukan identifikasi dan analisis terhadap suatu program. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap program maupun kebijakan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) faktor merupakan suatu hal baik itu keadaan maupun peristiwa yang dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu.

Menurut Peter dan Olson (2014:70) faktor budaya merupakan kerangka yang dianut masyarakat atau kebanyakan orang pada golongan sosial. Dalam artian yang lebih luas, budaya meliputi perspektif umum, reaksi afektid, kognisi tipikal dan pola perilaku yang khas. Menurut Ujang Sumarwan (2011:227) budaya merupakan bentuk nilai, kebiasaan, simbol yang mempunyai pengaruh suatu perilaku seseorang, sikap, pemikiran dan kepercayaan seseorang. Sedangkan menurut Schiffman, Leon G. dan Leslie L. Kanuk (2000:356) budaya merupakan nilai-nilai, kebiasaan yang dipelajari yang dapat membantu perilaku seseorang dan sebagai bentuk keseluruhan kepercayaan. Jadi kesimpulan dari pengertian budaya yakni kepercayaan, pemikiran, kebiasaan, pengaruh suatu perilaku seseorang dan perilaku dalam suatu masyarakat. Suatu budaya dianut bersama oleh masyarakat

dan berkembang dengan cara turun temurun. Kotler (2012:173-175) menjelaskan mengenai faktor dalam budaya yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kelas sosial merupakan bagian yang terdapat di masyarakat yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara hierarkis, dalam kelas sosial yang sama, nilai, minat dan tingkah laku anggotanya juga akan sama. Pada dasarnya masyarakat memiliki strata sosial yang kadang kala terbentuk sistem kasta dimana anggota dari kasta tersebut yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta tersebut.
- b. Budaya merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar karena hal ini berawal dari pemikiran ataupun kegiatan yang dianggap wajar oleh masyarakat hingga membentuk suatu kebiasaan yang sulit dirubah. Kebudayaan kemudian berkembang menjadi bentuk umum dari masyarakat yang berupa nilai, persepsi, norma, perilaku maupun preferensi yang diperoleh seseorang dari keluarga atau lembaga penting lainnya. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan suatu karya seni.
- c. Sub-budaya merupakan bagian dari budaya yang memiliki cakupan lebih sempit karena terpisah oleh sistem nilai. Setiap budaya memiliki sub-budaya tersendiri yang merupakan identifikasi dan sosialisasi khas untuk perilaku anggotanya. Sub-budaya terdiri dari agama, kelompok, ras, wilayah geografis dan kebangsaan.

Faktor sosial merupakan faktor penting dalam kehidupan individu, dimana nantinya setiap orang di dalam kehidupan sehari-hari akan selalu bersosialisasi dengan orang lain. Faktor sosial merupakan faktor yang terbentuk dari interaksi sosial antara individu dengan individu lainnya dalam suatu masyarakat. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Kotler (2012:175-177) menjelaskan faktor sosial yang meliputi:

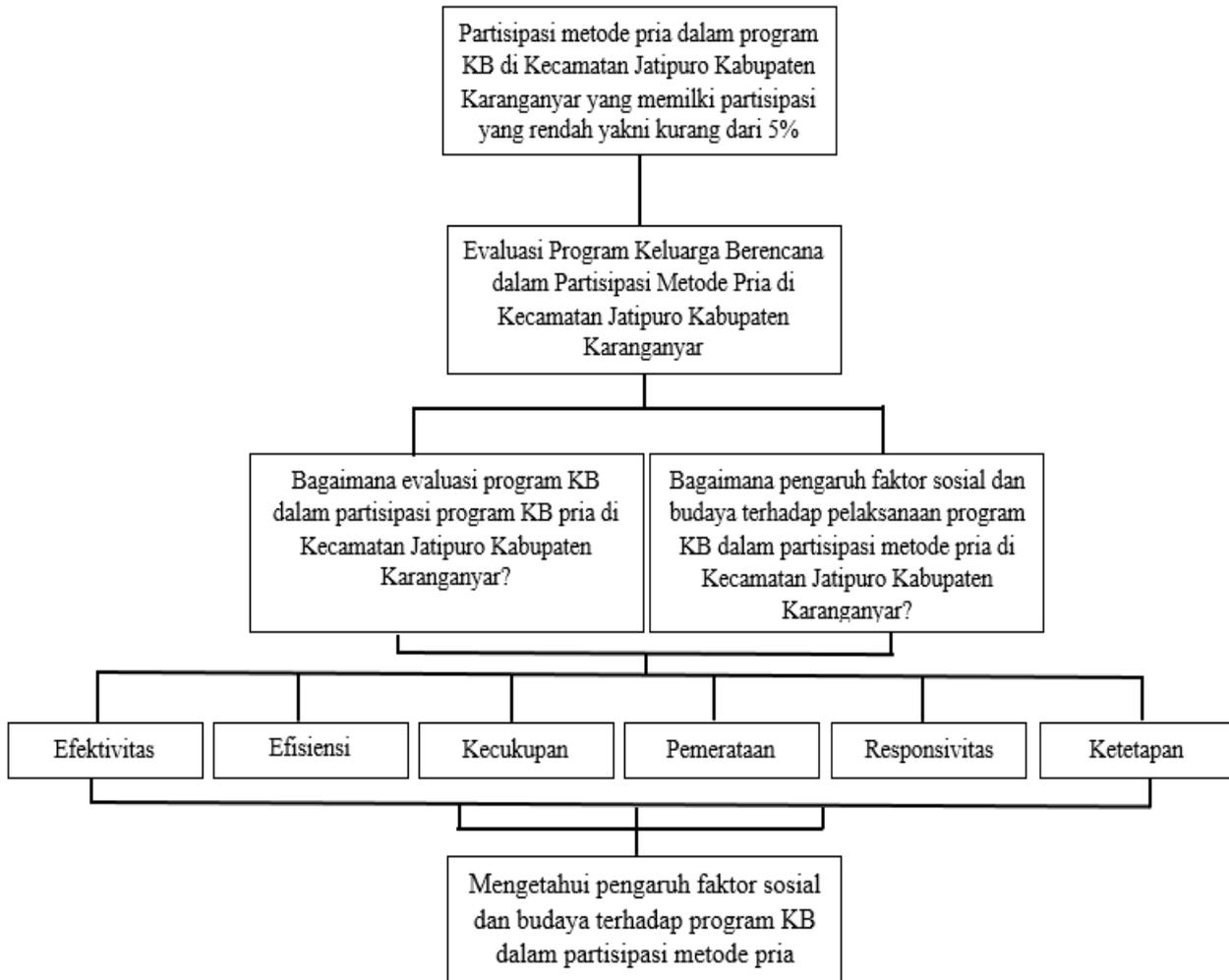
- a. Keluarga merupakan suatu kelompok yang terkecil di dalam masyarakat. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku seseorang. Seseorang tersebut kemudian dapat dipengaruhi oleh keterlibatan orangtua, anak atau keluarga terdekat/saudara dalam melakukan suatu aktivitas.
- b. Peran dan status merupakan kedudukan seseorang dalam kelas sosialnya, sehingga dapat membawa status sebagai cerminan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Peran dan status dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
- c. Kelompok referensi merupakan kelompok yang dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang dalam kelompok referensi dapat melakukan perbandingan sikap atau perilakunya dengan kelompoknya sendiri. Setelah melakukan perbandingan tersebut timbul rasa untuk menyesuaikan diri termasuk dalam hal memilih diantara beberapa pilihan. Kelompok referensi yang paling mempengaruhi seseorang adalah keluarga, tetangga, teman maupun rekan kerja.

W.J.S. Poerwadarminta dalam Muzaffar (2018:51) menjelaskan mengenai sosial dan budaya. Sosial merupakan suatu hal mengenai masyarakat atau dapat juga suatu hal yang suka memperhatikan hal umum atau kepentingan umum, sedangkan budaya merupakan semua hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budi yang mengandung cipta, karsa dan rasa. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sosial budaya merupakan semua hal yang dibentuk oleh manusia/masyarakat dengan pemikiran dan budi nuraninya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka dari itu pentingnya memperhatikan perubahan perilaku dari kelompok masyarakat. Banyak sekali pelaksanaan suatu kebijakan yang menuntut terjadinya perubahan perilaku yang mana seharusnya jika dalam membuat suatu kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang memiliki sedikit pengaruh pada perubahan perilaku kelompok masyarakat.

Faktor sosial budaya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yakni dalam mengatur, membentuk dan mempengaruhi suatu tindakan baik individu maupun kelompok sosial agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan mengenai kesehatan, maka faktor sosial budaya mampu menjadi suatu penentu bagi masyarakat setempat.

Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Analisa Peneliti, 2022

1.7. Operasional Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana program KB dilaksanakan khususnya dalam partisipasi metode pria dan untuk mengevaluasi apakah program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar sudah berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau belum berjalan sesuai dengan tujuan.

Beberapa definisi operasional yang akan digunakan pada penelitian “Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar” adalah:

1. Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah suatu hal yang berkaitan dengan memberikan nilai terhadap kebijakan maupun program yang sudah berjalan beberapa waktu, yang mana dalam penelitian ini menilai dari program KB dalam partisipasi metode pria.
2. Dapat melihat tujuan penelitian dari Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar, maka diperlukan kriteria evaluasi sebagai berikut:

a. *Effectiveness* (Efektivitas)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan yang sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Adapun indikasi yang akan diamati adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran program
- 2) Pencapaian tujuan program.
- 3) Waktu untuk mencapai tujuan program.
- 4) Strategi dalam pelaksanaan program.

b. *Efficiency* (Efisiensi)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan dengan cara melihat seberapa banyak usaha yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program. Adapun indikasi yang diamati adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pengelolaan program.

c. *Adequacy* (Kecukupan)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan dengan cara melihat keberadaan program kebijakan sudah dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada. Adapun indikasi yang akan diamati adalah sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan sumber daya.
 - a) Sumber daya manusia.
 - b) Ketersediaan *Reward*.
 - c) Upaya pencapaian tujuan program.
 - d) Fasilitas.

d. *Equity* (Pemerataan)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan dengan cara melihat pendistribusian sumber daya sudah dibagikan secara rata atau adil. Adapun indikasi yang akan diamati adalah:

- 1) Luasnya jangkauan program yang akan dilaksanakan.
- 2) Pemerataan pelayanan partisipasi pria.

e. *Responsiveness* (Responsivitas)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan dengan cara melihat respon masyarakat mengenai program yang sudah berjalan. Adapun indikasi yang akan diamati adalah:

- 1) Respon pemerintah terhadap program.
- 2) Respon masyarakat terhadap program.

f. *Appropriateness* (Ketetapan)

Fenomena ini nantinya akan menilai program kebijakan dengan cara melihat tepat atau tidaknya program kebijakan ini dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun indikasi yang akan diamati adalah:

- 1) Kemanfaatan program yang dirasakan kelompok sasaran.
3. Mengetahui faktor sosial dan budaya pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif sehingga dapat mengetahui pengaruh proses keberjalanan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dan ditelusuri berdasarkan temuan di lapangan saat penelitian berlangsung.

Tabel 1. 7 Operasional Konsep

Fokus Penelitian	Fenomena	Indikasi yang diamati
Evaluasi Program KB Dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar	<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	1) Sasaran program 2) Pencapaian tujuan program 3) Waktu untuk mencapai tujuan program. 4) Strategi dalam pelaksanaan program
	<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	1) Biaya pengelolaan program
	<i>Adequacy</i> (Kecukupan)	1) Ketersediaan Sumber daya a) Sumber daya manusia b) Ketersediaan <i>reward</i> c) Upaya pencapaian tujuan program d) Fasilitas
	<i>Equity</i> (Pemerataan)	1) Luasnya jangkauan program yang dilaksanakan 2) Pemerataan pelayanan partisipasi pria
	<i>Responsiveness</i> (Responsivitas)	1) Respon pemerintah terhadap program

Fokus Penelitian	Fenomena	Indikasi yang diamati
		2) Respon masyarakat terhadap program
	<i>Appropriateness</i> (Ketepatan)	1) Kemanfaatan program yang dirasakan kelompok sasaran
	Faktor Sosial dan Budaya terhadap Pelaksanaan Program KB dalam Partisipasi Metode Pria	Mengetahui faktor sosial dan budaya terhadap pelaksanaan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Sumber: Analisa Peneliti, 2022

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Sugiyono (2016:4) mengatakan bahwa jenis penelitian dapat diklasifikasikan menurut metode, tujuan, tingkat eksplanasinya dan dapat pula diklasifikasikan menurut tingkat kealamiah objek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci. Sedangkan pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2016:13) adalah data yang sudah terkumpul berbentuk kata maupun gambar, sehingga tidak berbentuk angka.

Dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi dan ingin mengetahui faktor sosial dan budaya di program Keluarga Berencana (KB) dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan penelitian evaluasi dikarenakan untuk menilai sejauh mana keefektifan program kebijakan guna dipertanggungjawabkan ketetapannya atau menilai sejauh mana tujuan yang telah dicapai dalam program tersebut. Dalam penelitian evaluasi ini nantinya dapat melihat kesenjangan diantara tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan kenyataan yang saat ini terjadi (Riant Nugroho, 2003:183).

1.8.2 Situs Penelitian

Situs yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data maupun penjelasan sebenarnya yang selaras dengan tempat yang akan diteliti. Situs yang diperoleh oleh peneliti dilaksanakan di Kecamatan Jatipuro, PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro, PLKB Kecamatan Jatipuro, Puskesmas Kecamatan Jatipuro dan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek penelitian ini berdasarkan tema penelitian yang meneliti tentang Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian dengan pihak-pihak yang terlibat program KB yang berada di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Maka peneliti menentukan subjek penelitiannya adalah Ketua Bidang KB DP3APPKB Kabupaten Karanganyar, pegawai PLKB Kecamatan Jatipuro, Bidan desa di wilayah Kecamatan Jatipuro (Puskesmas Kecamatan Jatipuro), pegawai PPKBD wilayah Kecamatan Jatipuro,

masyarakat wanita (istri) yang terlibat dalam program KB dan masyarakat yang tidak terlibat dan terlibat dalam kebijakan program KB khususnya pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Dalam penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan teknik *snowball sampling*. Sugiyono (2016:219) mengatakan *snowball sampling* merupakan metode penelitian yang menentukan sampel yang mula-mula hanya menggunakan sampel yang sedikit, kemudian akan membesar sampai seluruh kebutuhan sampel penelitian telah terpenuhi. Peneliti memilih teknik *snowball sampling* karena dalam penentuan sampel, peneliti yang pertamanya hanya memerlukan sedikit sampel saja tetapi karena data yang diperlukan dirasa belum memenuhi maka peneliti mencari sampel lagi agar data segera terpenuhi.

1.8.4 Jenis Data

Sugiyono (2015:13) menjelaskan bahwa jenis data penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu data kuantitatif, data kualitatif dan campuran dari data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang terbentuk dari kata, skema dan gambar. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang kemudian diangkakan. Sedangkan data campuran yaitu gabungan dari data kualitatif dengan data kuantitatif.

Dalam penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan data kualitatif yaitu dengan menggunakan kata-kata untuk dianalisis, sumber data tertulis, statistik dan penulis sendiri sebagai instrumennya.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan darimana data itu berasal atau diambil (Zuldafrial, 2012:46). Sementara itu di dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah menjelaskan kata-kata atau langkah yang akan diambil atau tanggapan atas pertanyaan atau topik yang akan dibahas (Lofland dan Lofland dalam Moleong, 2016:157). Sumber data terdapat dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2009:255).

a. Data Primer

Data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan wawancara kepada subjek penelitian secara langsung adalah data primer. Data primer dari penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan metode wawancara kepada informan yang berhubungan dengan program KB dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:187) dalam hal ini data sekunder merupakan data pendukung untuk data primer melalui dokumentasi, data dan arsip yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar seperti jurnal, skripsi, artikel dan situs-situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu juga melalui dokumen dan data yang dimiliki oleh dinas terkait yaitu PLKB Kecamatan

Jatipuro, Puskesmas Kecamatan Jatipuro dan DP3APPKB Kabupaten Karanganyar.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang akan dipakai oleh peneliti agar menemukan permasalahan yang ingin diteliti. Esterberg dalam Sugiyono (2016:231) mengatakan bahwa wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang saling bertukar informasi melalui pertanyaan yang kemudian dijawab yang nantinya dapat menemukan makna dalam sebuah topik.

Dalam penelitian Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar menggunakan wawancara tidak terstruktur. Hal ini tidak menggunakan poin-poin tertentu yang akan ditanyakan kepada informan terkait dan tidak memerlukan kaidah wawancara yang telah disusun.

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2016:145) observasi adalah proses yang paling berbelit-belit karena dilihat dari proses psikologis dan biologis. Marshall dikutip Sugiyono (2016:226) mendefinisikan observasi sebagai berikut:

“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”, yaitu melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Observasi memiliki tujuan agar dapat menjelaskan topik atau permasalahan yang diambil, dengan turun langsung ke lapangan atau mengikuti kegiatan yang ada dan berperan serta bersama orang yang bersangkutan. Observasi ini dilakukan dengan cara menganalisis, meninjau dan menulis hal-hal yang mengenai evaluasi program Keluarga Berencana dalam partisipasi metode pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

c. Dokumen

Setelah melakukan metode observasi dan wawancara, dalam penelitian kualitatif dilengkapi juga dengan dokumen. Sugiyono (2016:240) menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan harus memiliki kredibilitas. Dokumen yang dapat digunakan dapat berbentuk peraturan, kebijakan, hasil rapat, foto dan lain sebagainya. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar yaitu peraturan tentang program Kebijakan Berencana di Indonesia, peraturan tentang program Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar dan data mengenai program KB khususnya dalam partisipasi metode pria.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) menjelaskan mengenai analisis data yaitu suatu tahap mengumpulkan data secara sistematis yang didapatkan dengan cara wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan data ke dalam kategori, kemudian mengubahnya menjadi

beberapa unit, kemudian mensintesis dan menyusun polanya, kemudian memilih mana yang merupakan pembahasan yang penting untuk dipelajari dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model Spradley. Spradley dalam Sugiyono (2016:253) menjelaskan mengenai analisis data pada penelitian kualitatif yang dibagi menjadi 4 macam, yakni:

- a) Analisis domain merupakan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai objek penelitian atau suatu kondisi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan mendetail, peneliti dapat menemukan kategori sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih, maka akan memakan waktu yang lama dalam penelitian. Data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari hasil pemantauan. Hasil pemantauan tersebut bisa berupa gambaran umum dari objek penelitian yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui analisis domain, informasi yang diperoleh dikatakan belum mendalam, masih superfisial akan tetapi kategori situasi sosial yang diteliti akan ditemukan.
- b) Analisis struktur taksonomi merupakan analisis yang mendeskripsikan domain yang dipilih secara rinci untuk menentukan struktur internalnya. Analisis ini berdasarkan pada keseluruhan data yang dikumpulkan dalam domain yang ditemukan sebelumnya. Analisis taksonomi dapat digunakan untuk menganalisis kategori yang lebih rinci dan mendalam yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai istilah penutup. Hasil analisis taksonomi dapat berupa bentuk diagram kotak, diagram node dan diagram garis maupun analisis kontur yang

dapat digunakan untuk meringkas karakteristik dari masing-masing struktur internal.

- c) Analisis komponensial merupakan analisis yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pertanyaan yang berlawanan. Analisis komponensial menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi sedangkan untuk mencari datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumen terpilih. Dalam analisis komponensial ini nantinya terdapat banyak dimensi spesifik yang berbeda di setiap elemen.
- d) Analisis tema kultural merupakan analisis yang nantinya menemukan keterkaitan antara bidang-bidang dan keterkaitannya dengan keseluruhan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai tema atau judul dalam penelitian.

Interpretasi data merupakan usaha untuk mendapatkan makna yang lebih luas dan lebih dalam dari hasil penelitian yang sedang berlangsung. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan kajian yang cermat terhadap hasil yang relevan dan teori terkait serta informasi yang akurat dari lapangan.

Pada penelitian ini menggunakan analisis domain yang dibagi menjadi enam yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan dan faktor sosial budaya. Analisis domain digunakan agar dapat menemukan gambaran umum tetapi menyeluruh dari objek penelitian yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan informan menggunakan pertanyaan umum yang dilanjutkan dengan pertanyaan rinci agar dapat menemukan kategori sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.8.8 Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kebenaran data sendiri dapat dicapai dengan cara proses menghimpun data yang akurat dengan berbagai cara dan waktu, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara triangulasi. Dalam hal ini terdapat tiga triangulasi (Wiliam Wiersma dalam Sugiyono, 2016:273), yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah ada dengan beberapa sumber yang diperoleh.

b. Triangulasi Teknik

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil dengan cara mengecek data yang telah ada dengan cara yang berbeda. Misalnya jika data diperoleh dengan cara dokumentasi, maka pengecekan data bisa melalui wawancara, observasi dan cara yang lainnya.

c. Triangulasi Waktu

Metode ini digunakan untuk menemukan data yang orisinil dengan cara mengecek data observasi, dokumentasi maupun cara yang lain di waktu yang berbeda.

Kualitas data dalam penelitian Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar di uji menggunakan triangulasi sumber. Peneliti melakukan pengumpulan berbagai sumber data yang kemudian diolah menjadi satu kesimpulan terkait Evaluasi Program Keluarga Berencana dalam Partisipasi Metode Pria di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar.